

**ANALISIS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN
SHARIA COMPLIANCE TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA TAHUN 2013-2019**

TESIS



Oleh:

**KURNIAWATI SAFITRI
NIM 501180009**

**PROGRAM MAGISTER
PRODI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2020**

**ANALISIS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN
SHARIA COMPLIANCE TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA TAHUN 2013-2019**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai
Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Ekonomi Syariah**



Oleh:

**KURNIAWATI SAFITRI
NIM 501180009**

**PROGRAM MAGISTER
PRODI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini, saya **Kurniawati Safitri**, NIM **501180009**, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: *"Analisis Good Corporate Governance dan Sharia Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013-2019"* ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 07 Juni 2020
Pembuat Pernyataan,



Kurniawati Safitri
NIM 5011800

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniawati Safitri

NIM : 501180009

Program : Pascasarjana

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Analisis *Good Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* terhadap Kinerja Keuangan di Indonesia Tahun 2013-2019

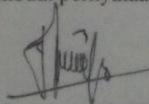
Menyatakan bahwa naskah Tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah Tesis ini di publikasikan oleh perpustakaan IAIN PONOROGO yang dapat di akses di etheses.iainponorogo.ac.id.

Adapun isi dari keseluruhan tulisan ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya

Ponorogo, 23 November 2021

Pembuat pernyataan,




Kurniawati Safitri

501180009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Kurniawati Safitri, NIM 501180009** dengan judul: **"Analisis Good Corporate Governance dan Sharia Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013-3019"**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munāqashah* Tesis.

Ponorogo, 07 Juni 2020
Pembimbing,



Dr. Shinta Maharani, SE.M.Ak.
NIP 197905252003122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AL-SURV/PT/12016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461871
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Kurniawati Safitri, NIM 501180009, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah dengan judul: *"Analisis Good Corporate Governance dan Sharia Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013-2019"* telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munāqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020** dan dinyatakan **LULUS**.

DEWAN PENGUJI:

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Iza Hanifuddin, Ph.D. NIP 196906241998031002 Ketua Sidang		18-6-20
2	Dr. Wirawan Fadly, M.Pd. NIP 198707092015031009 Penguji Utama		14-06-20
3	Dr. Shinta Maharani, S.E.M.Ak. NIP 197905252003122002 Penguji Kedua		28-6-20



Ponorogo, 24 Juni 2020

Direktur Pascasarjana,

Dr. Alsin, M.Ag.

NIP 197407012005011004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillāh al-Rahmān al-Rahīm

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. atas segala berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis sehingga tesis yang berjudul: ***”Analisis Good Corporate Governance dan Sharia Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013-2019”*** yang mengangkat isu dan kajian tentang bagaimana pengaruh tata kelola suatu perusahaan yang baik dan kepatuhan syariah suatu perusahaan terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah yang ada di Indonesia secara statistik kuantitatif dapat terselesaikan dengan baik, Penulis menyadari bahwa hanya dengan petunjuk-Nya kesulitan dan hambatan dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Tesis ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.) pada Program Magister Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua dan kakak-ku tersayang Rizka Fitrianita atas semangat dan pengertian mereka. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo, Dr. Aksin Wijaya, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo, Dr. Abid Rohmanu, M.HI., selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo, dan Iza Hanifuddin, Ph.D., selaku Kepala Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Ponorogo, beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses pembelajaran dan penyelesaian studi. Terima kasih juga disampaikan kepada

Dr. Shinta Maharani, SE.M.Ak., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis selama penyusunan tesis sejak awal hingga akhir dengan penuh kesabaran, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada Penulis, selama menuntut ilmu di Pascasarjana IAIN Ponorogo dan segenap jajaran akademik, staf administrasi dan perpustakaan Pascasarjana IAIN Ponorogo yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam penyelesaian studi. Tak lupa pula Penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabati kelas Ekonomi Syariah angkatan 2018, terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan semangat yang sangat berharga bagi Penulis. Dengan adanya Penulisan tesis ini Penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian tesis ini.

Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillah Penulis berharap semoga karya ilmiah ini bisa memberikan sumbangsih bagi para pembaca, menjadi amal jariyah bagi Penulis yang dinilai saleh di sisi Allah Swt., dan setiap kritik atas kekurangan tesis ini diharapkan dapat muncul penelitian serupa yang memperdalam dan mengembangkan wacana demi kajian lanjutan yang lebih bermakna bagi masyarakat, semoga tesis ini bermanfaat bagi Penulis dan pembaca pada umumnya. Aamin.

Ponorogo, 18 Mei 2020
Penulis,



Kurniawati Safitri
NIM. 501180009

ANALISIS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2013-2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh *Good Corporate Governance* yang terdiri dari: kepemilikan saham institusional, proporsi dewan komisaris independen, jumlah dewan direksi, *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio* terhadap kinerja keuangan yang dihitung dengan menggunakan *Return On Asset*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dari laporan tahunan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia selama periode 2013-2019 yang telah dipublikasikan. Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisa data pada penelitian ini adalah dengan metode regresi linier berganda. Dari penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa: tidak terdapat pengaruh signifikan kepemilikan saham institusional terhadap *Return On Asset* pada perbankan syariah di Indonesia, tidak terdapat pengaruh signifikan proporsi dewan komisaris independen terhadap *Return On Asset* pada perbankan syariah di Indonesia, terdapat pengaruh negatif antara jumlah dewan direksi terhadap *Return On Asset* pada perbankan syariah di Indonesia, tidak terdapat pengaruh signifikan *Islamic Income Ratio* terhadap *Return On Asset* pada perbankan syariah di Indonesia, terdapat pengaruh signifikan *Profit Sharing Ratio* terhadap *Return On Asset* pada perbankan syariah di Indonesia, terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan saham institusional, proporsi dewan komisaris independen, jumlah dewan direksi, *Islamic Income Ratio*, dan *Profit Sharing Ratio* secara simultan terhadap *Return On asset* pada perbankan syariah di Indonesia.

**ANALYSIS OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE
AND SHARIA COMPLIANCE ON SHARIA BANKING
FINANCIAL PERFORMANCE IN INDONESIA
2013-2019**

ABSTRACT

This research aims to analyze and explain the effect of Good Corporate Governance that consists of institutional share ownership, the proportion of independent commissioners, the total of boards of directors, Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio on financial performance calculated by Return On Assets. This research uses a quantitative approach with data collection techniques used is secondary data from the annual report of Islamic Banks in Indonesia during the 2013-2019 period that has been published. While the method used in analyzing data is the multiple linear regression method. Based on this study, it can be concluded that: There is no significant effect of institutional share ownership on Return On Assets in Islamic banking in Indonesia, There is no significant effect on the proportion of independent commissioners on Return on Assets in Islamic banking in Indonesia, There is a negative influence between the total of board of directors on Return On Assets in Islamic banking in Indonesia, There is no significant effect of Islamic Income Ratio on Return On Assets in Islamic banking in Indonesia, There is a significant effect on Profit Sharing Ratio on Return On Asset in Islamic banking in Indonesia, There is a significant influence between institutional share ownership, the proportion of independent commissioners, the total of boards of directors, Islamic Income Ratio, and Profit-Sharing Ratio simultaneously on Return On Assets in Islamic banking of Indonesia.

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR GRAFIK	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12

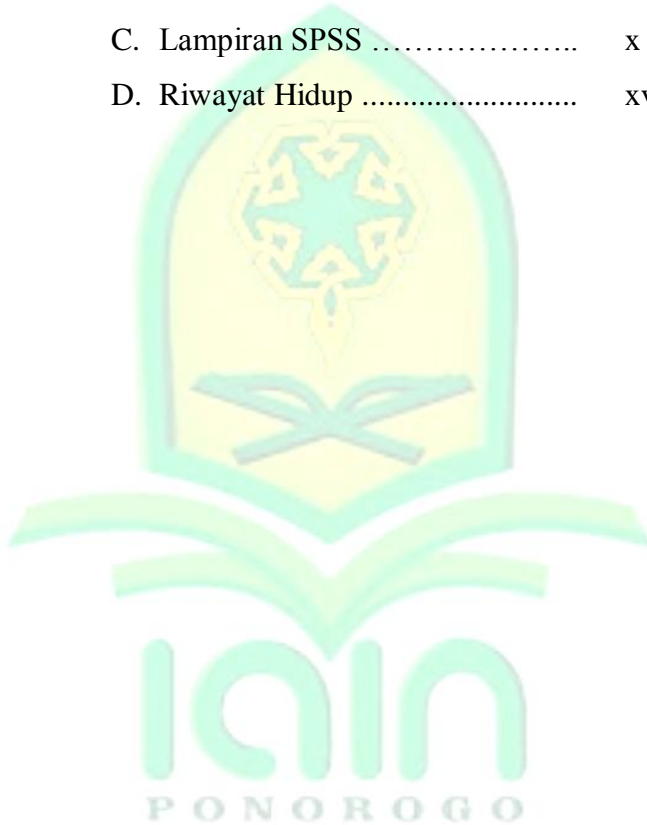
	D. Tujuan Penelitian	13
	E. Manfaat Penelitian	14
	F. Sistematika Penulisan	15
BAB II	<i>Good Corporate Governance dan Sharia Compliance Terhadap Kinerja Keuangan</i>	19
	A. Hasil Penelitian yang Relevan	19
	B. Landasan Teori	34
	C. Prosedur Penelitian	62
	D. Definisi Operasional Variabel	63
	E. Kerangka Berfikir	63
	F. Hipotesis	65
BAB III	METODE PENELITIAN	69
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian ..	69
	B. Desain Penelitian	70
	C. Populasi dan Sampel	70
	D. Data dan Sumber Data	71
	E. Variabel dan Definisi Operasional Variabel	72

	F. Metode Pengumpulan Data	75
	G. Metode Analisis Data	75
BAB IV	GAMBARAN UMUM	
	PENELITIAN	87
	A. Gambaran Data Penelitian	87
	B. Deskripsi Variabel Penelitian	90
	C. Sejarah Singkat Obyek Penelitian	95
	D. Analisis Data Penelitian	109
BAB V	Pengaruh Kepemilikan Saham	
	Institusional Terhadap <i>Return On</i>	
	<i>Asset</i> pada Perbankan Syariah di	
	Indonesia	125
BAB VI	Pengaruh Proporsi Dewan	
	Komisaris Independen Terhadap	
	<i>Return On Asset</i> pada Perbankan	
	Syariah di Indonesia	127
BAB VII	Pengaruh Jumlah Dewan Direksi	

	Terhadap <i>Return On Asset</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia ...	129
BAB VIII	Pengaruh <i>Islamic Income Ratio</i> Terhadap <i>Return On Asset</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia ...	131
BAB IX	Pengaruh <i>Profit Sharing Ratio</i> Terhadap <i>Return On Asset</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia ...	133
BAB X	Kepemilikan Saham Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Jumlah Dewan Direksi, <i>Islamic Income Ratio</i> , dan <i>Profit Sharing Ratio</i> Secara Simultan Terhadap <i>Return On Asset</i> Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	135
	A. Pengaruh Kepemilikan Saham Institusional, Proporsi Dewan	

	Komisaris Independen, Jumlah Dewan Direksi, <i>Islamic Income Ratio</i> , dan <i>Profit Sharing Ratio</i> Secara Simultan Terhadap <i>Return On Asset</i> Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.....	135
B.	Hasil analisis variabel dominan Kepemilikan Saham Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Jumlah Dewan Direksi, <i>Islamic Income Ratio</i> , dan <i>Profit Sharing Ratio</i> Terhadap <i>Return On Asset</i>	137
BAB XI	PENUTUP	139
	A. Kesimpulan	139
	B. Saran	140
	DAFTAR PUSTAKA	143
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	i

A. Daftar Sampel Bank Umum Syariah (BUS)	ii
B. Data Sampel Penelitian	ii
C. Lampiran SPSS	x
D. Riwayat Hidup	xviii



DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
2.A	Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
3.A	Definisi Operasional Variabel	39
4.A.1	Penarikan Sampel Penelitian	49
4.A.2	Sampel Bank yang Digunakan Penelitian	49
4.B.1	Rekap Kepemilikan Instusional	50
4.B.2	Rekap Komisaris Independen	50
4.B.3	Rekap Dewan Direksi	51
4.B.4	Rekap <i>Islamic Income Ratio</i>	52
4.B.5	Rekap <i>Profit Sharing Ratio</i>	52
4.B.6	Rekap ROA	53
4.D.1	Hasil Statistik Deskriptif	63
4.D.2	Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test	65
4.D.3	Hasil Uji Multikolinearitas	66
4.D.4	Hasil Uji Gletjser	68
4.D.5	Hasil Uji Autokorelasi	69
4.D.7	Hasil Uji Hipotesis T	70
4.D.8	Hasil Uji F Simultan	71
4.D.9	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
1.1	Prosedur Analisis Penelitian	34
1.2	Kerangka Berfikir	35



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Uraian	Halaman
D.1	Hasil Uji Normalitas (Analisis Grafik)	64
D.2	Hasil Uji Scatterplot	67



DAFTAR LAMPIRAN

No	Uraian	Halaman
1	SPSS Hasil Uji Statistik Deskriptif	ii
2	SPSS Hasil Uji Hasil Uji One Sample kolmogorov-Smirnov Test	ii
3	SPSS Hasil Uji Multikolinearitas	iii
4	SPSS Hasil Uji Gletjser	iii
5	SPSS Hasil Uji Autokorelasi	iv
6	SPSS Hasil Uji Hipotesis T	iv
7	SPSS Hasil Uji F SIMULTAN	v
8	SPSS Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	v

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahan tulisan dari teks Arab ke tulisan latin dengan mengacu pada standar *International Arabic Romanization*. Transliterasi tesis ini, baik pada keseluruhan kata, kalimat, dan ungkapan wajib mengacu dan memedomani standar tersebut secara baku dan konsisten demi menjadi tradisi akademik. Setiap kata, kalimat, dan ungkapan yang ditransliterasikan mesti ditulis miring (*italic*). Teks Arab untuk nama orang, tempat, atau lainnya tetap dilakukan transliterasi tanpa ditulis miring ketika belum menjadi tren atau belum terserap ke dalam kamus bahasa Indonesia.

A. Penyesuaian Perubahan Huruf

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ء	'	سأل	<i>sa'ala</i>
ب	<i>b</i>	بدل	<i>badala</i>
ت	<i>t</i>	تمر	<i>tamr</i>
ث	<i>th</i>	ثورة	<i>thawrah</i>

ج	<i>j</i>	جمال	<i>Jamāl</i>
ح	<i>h</i>	حديث	<i>ḥadīth</i>
خ	<i>kh</i>	خالد	<i>khālīd</i>
د	<i>d</i>	ديوان	<i>dīwān</i>
ذ	<i>dh</i>	مذهب	<i>madhhab</i>
ر	<i>r</i>	رحمن	<i>raḥmān</i>
ز	<i>z</i>	زمزم	<i>zamzam</i>
س	<i>s</i>	سراب	<i>Sarāb</i>
ش	<i>sh</i>	شمس	<i>shams</i>
ص	<i>s</i>	صبر	<i>ṣabr</i>
ض	<i>d</i>	ضمير	<i>ḍamīr</i>
ط	<i>t</i>	طاهر	<i>ṭāhir</i>
ظ	<i>z</i>	ظهر	<i>ẓuhr</i>
ع	‘	عبد	<i>‘abd</i>
غ	<i>gh</i>	غيب	<i>ghayb</i>
ف	<i>f</i>	فقه	<i>fiqh</i>
ق	<i>q</i>	قاضي	<i>qāḍī</i>

ك	<i>k</i>	كأس	<i>ka's</i>
ل	<i>l</i>	لبن	<i>laban</i>
م	<i>m</i>	مزمارة	<i>mizmār</i>
ن	<i>n</i>	نوم	<i>nawm</i>
هـ	<i>h</i>	هبط	<i>habaṭa</i>
و	<i>w</i>	وصل	<i>waṣala</i>
ي	<i>y</i>	يسار	<i>yasār</i>

B. Vokal Pendek

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
اَ	<i>a</i>	فعل	<i>fa'ala</i>
اِ	<i>i</i>	حسب	<i>ḥasiba</i>
اُ	<i>u</i>	كتب	<i>kutiba</i>

C. Vokal Panjang

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
اَ، اِ، اِو	<i>a</i>	كاتب، قضي	<i>kātib, qaḍā</i>
يِ	<i>i</i>	كريم	<i>karīm</i>

و	<i>u</i>	حروف	<i>ḥurūf</i>
---	----------	------	--------------

D. Diftong

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
وْ	<i>aw</i>	قول	<i>qawl</i>
يْ	<i>ay</i>	سيف	<i>sayf</i>
يَّ	<i>Iyy (shiddah)</i>	غني	<i>ghaniyy</i>
و	<i>uww (shiddah)</i>	عدو	<i>'aduww</i>
ي	<i>i (nisbah)</i>	الغزالي	<i>al-Ghazālī</i>

E. Pengecualian

1. Huruf Arab ء (*hamzah*) pada awal kata ditransliterasikan menjadi a, bukan 'a. Contoh: أكبر, transliterasinya: *akbar*, bukan 'akbar.
2. Huruf Arab (tā' marbūḥah) pada kata tanpa (al) yang bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan menjadi 't'. Contoh: وزارة التعليم, transliterasinya: *Wizārat al-Ta'lim*, bukan *Wizārah al-Ta'lim*. Namun, jika ada kata

yang menggunakan (*al*) pada perkataan tunggal atau perkataan terakhir, *tā' marbūṭah* ditransliterasikan pada 'h', contoh:

- a. المكتبة المنيرية *Al-Maktabah al-Muniriyyah*
- b. قلعة *Qal'ah*
- c. دار وهبة *Dār Wahbah*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu industri jasa keuangan yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan modern ini, mulai dari memberikan layanan, penyediaan berbagai macam layanan investasi, hingga sarana penitipan dan pinjam meminjam uang dalam jumlah besar. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga perbankan berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana, sehingga didalamnya terjadi perputaran uang yang signifikan. Sebagai salah satu industri jasa keuangan, dimana terdapat berbagai macam aturan khusus, mengharuskan perbankan menerapkan berbagai macam standar operasional demi terhindar dari risiko kepatuhan. Perbankan merupakan salah satu industri yang

rawan risiko baik risiko operasional, risiko hukum, maupun risiko reputasi.¹

Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Setelah diberlakukannya undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ini maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang dapat mendorong pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Perkembangan perbankan syariah saat ini telah mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% dalam lima tahun terakhir, maka peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional diharapkan akan lebih signifikan.

¹ Sabatini, "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesiai*, Vol. 6 No. 3 (Desember, 2010), 221.

Perbankan syariah di Indonesia terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada penelitian ini akan difokuskan pada Bank Umum syariah saja. Kondisi keuangan Bank Umum Syariah terus menunjukkan pertumbuhan positif setiap tahunnya. Berdasarkan pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Desember 2018, terdapat 14 Bank Umum syariah di Indonesia dengan total aset sebesar Rp. 316,69 triliun yang mengalami peningkatan sebesar 13,97% dari tahun sebelumnya. Potret Bank Umum Syariah sebenarnya cukup menggembirakan dengan tingkat ROA sebesar 1,28%, sedangkan dalam permodalan rasio CAR mencapai 19,33% yang menunjukkan kinerja positif Bank Umum Syariah.²

Secara struktural, sistem pengawasan perbankan Islam mencakup dua hal, pertama pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian bank. Kedua pengawasan prinsip syariah dalam hal operasional bank.³ Hal penting yang perlu diperhatikan dalam

² <https://www.ojk.go.id/bank-syariah>, Diakses pada Tanggal 05 Februari 2020 Pukul 21.06.

³ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 61.

pengembangan perbankan syariah adalah kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah yang masih belum lengkap, cakupan pasar masih terbatas, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan jasa perbankan syariah, institusi pendukung yang masih belum lengkap dan efektif, efisiensi potensi operasional perbankan syariah yang masih belum optimal, porsi skim pembiayaan bagi hasil dalam transaksi bank syariah masih perlu diingatkan, dan perbankan syariah harus menghadapi problem eksternal (makro) dan problem internal (mikro).⁴

Salah satu pilar penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah adalah kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*). Pilar inilah yang akan menjadi pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan syariah diperlukan pengawasan yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pemerintah telah mengeluarkan dua undang-undang yang memposisikan Dewan Pengawas Syariah secara strategis untuk memastikan kepatuhan akan prinsip-prinsip syariah di

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 107.

lembaga perbankan syariah.⁵ Kepatuhan dan kesesuaian bank terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah, hal ini menunjukkan bahwa selama ini praktik perbankan syariah kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi salah satu factor penyebab rendahnya reputasi bank syariah.⁶ Pelanggaran kepatuhan syariah yang dibiarkan akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.⁷

Dalam dunia perbankan terutama pada perbankan syariah sangat diperlukan pengelolaan sistem secara benar dan tepat. Dalam hal ini mekanisme pengelolaan harus dilakukan secara baik dan tepat agar bank tersebut dapat melaksanakan visi dan misi serta tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengelolaan yang dimaksudkan disini adalah melakukan strategi dalam mengatur sistem agar dapat menghasilkan hal yang telah ditentukan seperti visi, misi dan tujuan. Dengan

⁵ Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 31.

⁶ *Ibid.*, 110.

⁷ Dwi Aryani dan Febrina Rosmita, "Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap kepuasan pelanggan dalam membentuk loyalitas pelanggan", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Fakultas Firsip Universitas Indonesia, Vol. 17, No. 2, Mei, 2010, 1.

dilakukan pengelolaan secara baik maka bank tersebut akan mendapatkan reputasi yang baik dan akan menarik minat masyarakat untuk melakukan transaksi di bank tersebut sehingga mereka bisa menjadi nasabah bank tersebut. Untuk melaksanakan pengelolaan secara baik, dapat diterapkan sistem *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* merupakan suatu tata kelola perusahaan yang baik yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).⁸

Tidak dapat dipungkiri bahwa istilah *good corporate governance*⁹ semakin populer. Tidak hanya populer, istilah tersebut juga ditempatkan pada posisi terhormat. *Good corporate governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang sekaligus memenangkan persaingan bisnis global

⁸ Indra Surya dan Ivan Yustivandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha* (Jakarta: Kencana, 2008), 116.

⁹ GCG dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tata kelola perusahaan yang baik, yaitu mendefinisikan GCG sebagai struktur yang oleh para pemegang saham, komisaris, dan manager dalam menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan dan mengawasi kinerja pada perusahaan.

terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka.¹⁰

Secara teoritis praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan direksi dengan keputusan yang mungkin kurang menguntungkan bagi perusahaan.¹¹ Tata kelola perusahaan yang buruk mengakibatkan perusahaan rentan akan berbagai masalah dan tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Buruknya tata kelola perusahaan tentu erat kaitannya dengan manajemen yang buruk. Sedangkan manajemen yang buruk tentu berpengaruh pada pengelolaan keuangan perusahaan itu sendiri. Hal ini terbukti dengan adanya krisis ekonomi yang ada di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Banyak perusahaan yang merugi dan tidak bisa bertahan karena tata kelola perusahaan yang buruk tersebut. Beberapa hasil *assesment* terhadap *corporate governance* di Indonesia, menunjukkan hasil yang belum memuaskan dan upaya

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 405.

¹¹ M. achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia* (Jakarta: PT. Ray Indonesia, 2005), 3.

perbaikan, *corporate governance* belum dilakukan secara komprehensif.¹² Hal ini menjadi pelajaran terutama dalam dunia perbankan agar lebih berhati-hati dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu pengelolaan *good corporate governance* harus ditingkatkan khususnya didunia perbankan yaitu bank konvensional khususnya juga pada bank syariah.

Peningkatan kualitas pelaksanaan *good corporate governance* merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan arsitektur perbankan Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan *good corporate governance* pada Bank umum Syariah dan unit usaha Syariah, saat ini terkait dengan penerapan *good corporate governance* dikeluarkan surat edaran Bank Indonesia No 12/13/DPbs/2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah sebagai penyempurna dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009.¹³

¹² Resti Ardhanawati, "Pelaksanaan dan Pengungkapan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah" *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2 No. 1 (April 2017), 66-78.

¹³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam Hamdani, *Good Corporate Governance*:

Penerapan GCG merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia perbankan terutama pada bank syariah yang melakukan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadith. Selaras dengan prinsip-prinsip yang ada pada GCG dapat juga dijelaskan secara syariah yaitu: kejujuran (sidiq), pengetahuan kepada masyarakat (tabligh), kepercayaan (amanah), dan pengelolaan secara profesional (fathanah). Kejujuran sangat diperlukan dalam bank syariah karena prinsip ini dapat membuat masyarakat yakin bahwa bank syariah baik dalam mengelola dana yang dipercayakan. Pengetahuan kepada masyarakat merupakan prinsip yang dapat memberikan informasi secara akurat, baik dan tepat yang dapat memudahkan dan membuat nasabah nyaman pada bank syariah. Kepercayaan adalah prinsip yang sangat penting, dimana bank syariah harus berusaha meyakinkan masyarakat bahwa bank syariah benar-benar berpedoman pada prinsip syariah sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dana mereka. Pengelolaan secara profesional juga merupakan prinsip yang penting yang harus dilakukan bank syariah agar dapat bersaing

dengan bank lain dan juga dapat menjadi acuan penilaian nasabah terhadap kinerja pada bank syariah. Maka dari itu, kepatuhan pada prinsip syariah juga sangat menentukan kualitas bank syariah.¹⁴

Sedangkan kinerja keuangan merupakan salah satu patokan utama untuk mengukur baik buruknya kinerja suatu perusahaan, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangannya. Mengukur kinerja keuangan dapat diketahui melalui dua sisi yaitu internal dan eksternal perusahaan dengan cara menghitung kinerja keuangan suatu perusahaan melalui indikator rasio keuangan. Rasio keuangan terdiri dari likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Sedangkan rasio yang sering digunakan dalam menilai kinerja keuangan adalah *Return On Asset (ROA)*. ROA merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan. ROA dapat menunjukkan efisiensi dari aset yang digunakan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik pula kinerja suatu perusahaan.¹⁵

¹⁴ Mal an Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2010), 89.

¹⁵ Salsabila Sarafina dan Muhammad Saifi, "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan (Studi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015), Malang: Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu

Perusahaan yang nilainya tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Sedangkan buruknya nilai suatu perusahaan seperti belum berfungsinya sistem perencanaan dan pengendalian intern secara optimal, rendahnya integritas direksi, terjadinya penyimpangan oleh direksi yang tidak mencerminkan keterkaitan dengan pencapaian target kinerja, intervensi pemegang saham atau pihak luar secara berlebihan dalam kegiatan operasional pada suatu perusahaan dapat disebabkan karena masih rendahnya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Sharia Compliance* (kepatuhan syariah) pada perbankan syariah.¹⁶

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis akan menganalisis lebih dalam berkaitan dengan bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance*, *Sharia Compliance* dan kinerja keuangan pada perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.

Administrasi, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 50 No. 3 September 2017, 109. (-108-117).

¹⁶ Ibid., 111.

B. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang meluas dalam penelitian ini, maka perlu untuk memberikan batasan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Penelitian ini tidak mengkaji seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, penelitian ini hanya mengkaji pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* terhadap kinerja keuangan melalui rasio profitabilitas melalui *Return On Asset (ROA)*.
2. Pada variabel *Good Corporate Governance*, penelitian hanya membatasi pada kepemilikan saham institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan jumlah dewan direksi.
3. Pada variabel *Sharia Compliance*, penelitian hanya membatasi pada *Islamic Income Ratio*, dan *Profit Sharing Ratio*.
4. Penelitian ini hanya mengambil sampel pada bank syariah yang ada di Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan mengenai *Good Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* pada situs resmi otoritas jasa keuangan.
5. Periode pada penelitian ini yaitu mulai tahun 2013-2019.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Kepemilikan Saham Institusional mempengaruhi *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia?
2. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen mempengaruhi *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia?
3. Apakah Jumlah Dewan Direksi mempengaruhi *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia?
4. Apakah *Islamic Income Ratio* mempengaruhi *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia?
5. Apakah *Profit Sharing Ratio* mempengaruhi *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia?
6. Apakah kepemilikan saham institusional, proporsi dewan komisaris independen, jumlah dewan direksi, *Islamic Income Ratio*, dan *Profit Sharing Ratio* secara simultan mempengaruhi *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel Kepemilikan Saham Institusional terhadap *Return On*

Asset pada Perbankan Syariah di Indonesia.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel Jumlah Dewan Direksi terhadap *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel *Islamic Income Ratio* terhadap *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel *Profit Sharing Ratio* terhadap *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel kepemilikan saham institusional, proporsi dewan komisaris independen, jumlah dewan direksi, *Islamic Income Ratio*, dan *Profit Sharing Ratio* secara simultan terhadap *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang ekonomi syariah terkait tata kelola perusahaan dan kepatuhan syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan pada perbankan syariah.
- b. Dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan perbankan khususnya pada perbankan syariah supaya bisa menjadi lebih baik.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Penelitian ini tentunya akan bermanfaat sebagai penunjang penelitian yang berhubungan dengan perbankan, khususnya terkait dengan bagaimana mengelola suatu perusahaan yang baik agar mengurangi adanya resiko yang mungkin terjadi pada perbankan.

b. Perbankan.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan motivasi dan koreksi diri dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan juga kepatuhan syariah pada perbankan sebagai mitigasi resiko agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan juga mempunyai tingkat keuangan yang sehat.

c. Bagi masyarakat/nasabah.

Mengetahui seberapa tinggi tingkat kualitas pengelolaan pada perbankan syariah kantor cabang pembantu ponorogo agar lebih bijak dalam menghadapi persoalan pada perbankan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memperjelas dari masing-masing bab secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunannya. Sistematika pembahasan diperlukan untuk memberikan gambaran secara umum tentang muatan tesis. Sistematika pembahasan dalam penelitian tesis ini terbagi kedalam tiga bagian, yaitu awal, isi, dan akhir. Sebelum masuk pada bagian awal, tesis ini diawali dengan halaman formalitas yang terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian tulisan, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bagian isi terdiri dari bab I, bab II, bab III, bab IV, bab V, bab VI, bab VII, bab VIII dan bab IX, bab X, bab XI, sedangkan bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Sistematika pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah untuk memaparkan permasalahan akademik yang dibahas, identifikasi masalah, pembatasan masalah yang bertujuan agar pembahasan dalam tesis ini tidak melebar mudah diterima dan dipahami oleh pembaca, kemudian dirumuskan kedalam bentuk rumusan masalah, penjelasan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang kajian teoretik, mencakup pembahasan mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan dan landasan teori berkaitan dengan *Corporate Governance*, *Sharia Compliance* dan kinerja keuangan pada perbankan syariah. Mengemukakan kerangka pemikiran dari peneliti untuk memetakan penelitian serta menjelaskan hipotesis dari penelitian ini.

Bab III, berisi tentang metode penelitian meliputi rancangan penelitian yang menjelaskan secara umum metode penelitian, variabel penelitian, definisi operasional dari setiap variabel, populasi, sampel, teknik sampling mencakup jenis dan sumber data, metode pengumpulan data mencakup instrumen-instrumen yang digunakan serta metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam menganalisis dan

membaca hasil pengolahan data.

Bab IV, berisi tentang hasil dan pembahasan yang mencakup pemaparan data yang diperoleh dari lapangan berupa gambaran umum data penelitian, deskripsi variabel penelitian, sejarah singkat obyek penelitian, dan analisis data penelitian.

Bab V, berisi tentang hasil dan pembahasan rumusan masalah yang pertama yang kemudian dianalisis.

Bab VI, berisi tentang hasil dan pembahasan rumusan masalah yang kedua yang kemudian dianalisis.

Bab VII, berisi tentang hasil dan pembahasan rumusan masalah yang ketiga yang kemudian dianalisis.

Bab VIII, berisi tentang hasil dan pembahasan rumusan masalah yang keempat yang kemudian dianalisis.

Bab IX, berisi tentang hasil dan pembahasan rumusan masalah yang kelima yang kemudian dianalisis.

Bab X, berisi tentang hasil dan pembahasan rumusan masalah yang keenam yang kemudian dianalisis.

Bab XI merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran.

BAB II

Good Corporate Governance dan Sharia Compliance

Terhadap Kinerja Keuangan

A. Hasil Penelitian yang Relevan

Penulis melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini agar nantinya tidak terjadi kesamaan dari kajian hasil penelitian terdahulu. Adapun hasil temuan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.A Hasil Penelitian Terdahulu yang relevan

No	Nama/Judul/Tahun	Hasil penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Achmad Noor Fauzi Pengaruh (<i>Good Corporate Governance</i>) Terhadap Kinerja Keuangan	Secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komite audit dan dewan pengawas	a. Menggunakan satu variabel X b. Periode penelitian tahun 2011-2016.	a. Menggunakan data panel. b. Sama-sama menggunakan variabel terikat <i>Good Corporate</i>

	(Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2015)/2016	syariah terhadap ROA. ¹⁷		<i>Governance</i> . c. Sama-sama menggunakan variabel bebas kinerja keuangan. d. Sampel penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2	Ananda Anugrah Nasution (Pengaruh <i>Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance</i> dan <i>Islamic Sosial Reporting Terhadap Kinerja</i>	a. <i>Sharia Compliance</i> dengan indikator <i>Islamic Income Ratio</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. b. <i>Sharia compliance</i> dengan	a. Hanya menggunakan data <i>cross section</i> b. Lebih pada mengukur perusahaan sebagai moderatin g.	a. Menggunakan variabel bebas <i>Sharia Compliance</i> dan <i>Corporate Governance</i> b. Menggunakan variabel terikat

¹⁷ Achmad Noor Fauzi, “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015)”, *Tesis*, Surakarta: Manajemen Keuangan Perbankan Syariah, 2016, 1-113.

	<p>Keuangan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Moderating pada Bank Syariah)/2018</p>	<p>indikator <i>profit sharing ratio</i> berpengaruh positif signifikan.</p> <p>c. <i>Zakat performance ratio</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.</p> <p>d. Pengungkapan <i>Islamic Corporate Governance</i> dengan indikator <i>Sharia Governance</i> berpengaruh negatif signifikan</p> <p>e. <i>Islamic corporate Governance</i> dengan indikator <i>General Governance</i> berpengaruh positif signifikan</p>		<p>kinerja keuangan.</p>
--	--	---	--	--------------------------

		<p>terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.</p> <p>f. Secara simultan ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara <i>sharia compliance (Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio dan Zakat Performance Ratio)</i>, pengungkapan <i>Islamic Corporat Governance (sharia Governance dan General Governance)</i>, dan pengungkapan <i>Islamic Sosial Reporting</i> terhadap kinerja keuangan.</p>		
--	--	--	--	--

		<p>g. Secara parsial ukuran perusahaan hanya mampu memoderasi hubungan antara <i>sharia compliance</i> dengan indikator <i>Islamic Income Ratio</i> dan <i>Zakat Performance Ratio</i> terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.</p> <p>h. Penelitian ini mengindikasikan bahwa aktivitas <i>sharia compliance</i>, pengungkapan <i>Islamic Corporate Governance</i> dan <i>Islamic Sosial Reporting</i> sama pentingnya dengan strategi</p>		
--	--	---	--	--

		bisnis Bank Syariah dalam Meningkatkan kinerja Keuangan. ¹⁸		
3	Siti Yuraida Pengaruh <i>Sharia Governance</i> terhadap kepercayaan nasabah Bank Syariah dengan Reputasi Perbankan sebagai Variabel Medias (Studi Kasus di Bank Pembangunan Daerah DIY Syariah)/2016	<p>a. Implementasi <i>shariah governance</i> meliputi enam indikator yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan.</p> <p>b. <i>Sharia compliance</i> menunjukkan hasil yang variatif. <i>Sharia compliance</i> merupakan indikator <i>Islamic Governance</i> yang dominan.</p>	<p>a. Menggunakan variabel kepercayaan nasabah.</p> <p>b. Hanya menggunakan satu variabel X saja</p> <p>c. Lokasi penelitian di Bank Pembangunan Daerah</p>	a.sama-sama menggunakan variabel bebas <i>Sharia Governance</i>

¹⁸ Ananda Anugrah Nasution, “Pengaruh *Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Sosial Reporting* Terhadap Kinerja Keuangan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Moderating pada Bank Syariah”, *Tesis*, Sumatera Utara: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2018, 1-125.

		c. Implementasi <i>sharia governance</i> memiliki pengaruh yang signifikan pada reputasi dan kepercayaan pelanggan terhadap perbankan syariah. ¹⁹		
4	Rizki Maulidani (Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Perseroan Tertutup (Studi Kasus PT. Mega Politan Development)/ 2012	a. Penerapan GCG yang efektif dapat dilakukan dengan mengadopsi prinsip-prinsipnya kedalam regulasi yang memaksa Perseroan Tertutup untuk mematuhi. b. Penerapan prinsip GCG dalam suatu PT	a. Penelitian kualitatif deskriptif b. Untuk mengetahui Penerapan GCG pada Perseroan Tertutup c. Lokasi penelitian di sebuah Perseroan Tertutup.	a. Objek penelitian berkaitan dengan <i>Good Corporate Governanc e</i> . b. Subjek penelitian ditujukan pada suatu lembaga.

¹⁹ Siti Yuraida, “Pengaruh *Sharia Governance* Terhadap Kepercayaan Nasabah Bank Syariah dengan Reputasi Perbankan Sebagai Variabel Mediasi”, *Tesis*, Yogyakarta: Keuangan dan Perbankan Syariah, 2016, 1-128.

		tidak lagi mampu mengikuti tuntutan masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya pengaturan mengenai Dewan Komisaris dan akan menyebabkan maraknya praktik pengangkatan anggota Dewan Komisaris dengan tujuan mempunyai akses ke instansi pemerintah yang bersangkutan serta alasan lain yang akan mengesampingkan integritas dan kemampuan Dewan		
--	--	--	--	--

		komisaris. ²⁰		
5	Amartantina Novitasari (Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan dengan RGEC (<i>Rick Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital</i>) pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017	<p>a. Berdasarkan tabel <i>output independent sampel test</i> pada bagian <i>equal variances assumed</i> diketahui bahwa NPL nilai sig. (2-tailed) sebesar $0.601 > 0.05$ sehingga bisa dikatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara rata-rata hasil NPL, BSM dan Muamalat.</p> <p>b. Pada variabel LDR, berdasarkan tabel <i>output independent sampel test</i> pada bagian <i>equal</i></p>	<p>a. Membandingkan antara variabel X dengan variabel Y.</p> <p>b. Lokasi penelitian di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri.</p>	<p>a. Menggunakan data panel</p> <p>b. Penelitian kuantitatif deskriptif</p>

²⁰ Rizki Maulidani, “Penerapan *Good Corporate Governance* pada Perseroan Tertutup (Studi Kasus PT. Mega Politan Development)”, *Tesis*, Depok: Kenotariatan, 2012, 1-87.

		<p><i>variances assumed</i> diketahui nilai sig (2-tailed) sebesar 0.148>0.05, sehingga ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil LDR BSM dan Muamalat.</p> <p>c. Pada variabel ROA berdasarkan output diketahui nilai Asymp Sig. (2-tailed) sebesar 0.116 karena nilai Asymp Sig. (2-tailed) sebesar 0.116>0.05 sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap ROA antara Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri</p>		
--	--	--	--	--

		<p>d. Pada variabel NIM berdasarkan tabel output independen sampel test pada bagian equal variance assumed diketahui nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0 < 0.05$ sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil NIM BSM dan Muamalat.</p> <p>e. Pada variabel CAR, berdasarkan tabel output independent sampel test pada bagian equal variance assumed diketahui nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0.170 > 0.005$</p>		
--	--	---	--	--

		sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil CAR BSM dan Muamalat. ²¹		
6	Sri Wijayanti (Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2011/2012.	Dari hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, aktivitas (rapat) dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Hasil penelitian ini juga	a. Sampel pada penelitian ini terdapat pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). b. Tahun periode pada penelitian mulai tahun 2009-2011)	a. Sama-sama menggunakan variabel terikat kinerja keuangan. b. Sama-sama menggunakan variabel bebas <i>Corporate Governance</i> .

²¹ Amartantina Novitasari, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan dengan RGEC (*Rick Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital*) pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017", *Tesis*, Ponorogo: Ekonomi Syariah, 2019, 1-114.

		<p>menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada perbankan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada perbankan. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap kinerja keuangan perbankan masih sangat kurang.</p>		
7	<p>Diana Istigfarin (Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i>)</p>	<p>variabel kepemilikan institusi dan CGPI berpengaruh positif signifikan</p>	<p>a. Sampel penelitian pada penelitian ini adalah Badan</p>	<p>a. sama-sama menggunakan variabel bebas <i>Good Corporate Governance</i>.</p>

	Terhadap Profitabilitas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/2015	terhadap profitabilitas, sedangkan variabel dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.	Usaha Milik Negara (BUMN) b. Menggunakan variabel terikat profitabilitas.	
8	Nova Andrianto (Pengaruh Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> terhadap kinerja manajerial/2013.	a. Pengendalian intern berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja manajerial. b. Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja manajerial.	a. Sampel penelitian pada PT BRI Jember. b. Menggunakan variabel terikat kinerja manajerial.	Menggunakan variabel bebas <i>Good Corporate Governance</i> .
9	Widyaloka (Analisis Pengaruh Kepatuhan	Berdasarkan perhitungan hasil F simultan dapat disimpulkan bahwa tugas dan	a. Menggunakan variabel terikat Dana Pihak	a. menggunakan variabel bebas <i>Sharia Compliance</i>

	<p>Syariah (<i>Sharia Compliance</i>) terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015.</p>	<p>tanggungjawab dewan komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS, pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi audit ekstern, BMPD transparansi kondisi keuangan dan non keuangan</p>	<p>Ketiga b. Tahun periode pada penelitian 2010-2015.</p>	<p>(Kepatuhan Syariah) b. sampel penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia.</p>
--	---	--	---	--

		BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga.		
--	--	--	--	--

B. Landasan Teori

1. Kinerja Keuangan

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan, karena kinerja adalah cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Kinerja merupakan serangkaian kegiatan yang menggambarkan sejauh mana hasil yang sudah dicapai oleh seseorang atau perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya baik berupa keberhasilan maupun kekurangan yang terjadi. Kinerja mensyaratkan adanya semangat kerja yang didalamnya termasuk beberapa nilai keberhasilan baik untuk organisasi maupun perorangan.²²

²² Sudaryono, *Pengantar Manajemen Teori dan Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2017), 66.

Kinerja bank merupakan ukuran keberhasilan dari direksi bank tersebut sehingga apabila kinerja menjadi buruk bukan tidak mungkin disebabkan karena kelalaian dari direksi. Kinerja juga merupakan pedoman hal apa saja yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya.²³ Secara umum kinerja dibagi menjadi dua yaitu kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. Kinerja non keuangan adalah faktor kualitatif yang mendukung kinerja keuangan yang bersifat kuantitatif, pengukuran kinerja keuangan mengarah kepada perbaikan, perencanaan, implementasi dan pelaksanaan strategis.

Sedangkan kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang umumnya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.²⁴ Untuk melihat kinerja keuangan maka bank harus menggunakan laporan keuangan secara baik dan benar. Laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Keuntungan dengan

²³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 329.

²⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), 42-43.

membaca laporan keuangan pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan kekuatan yang dimiliki.²⁵

b. Laporan keuangan

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam bukunya standart akuntansi keuangan 1994 telah dikatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi: neraca, laba rugi, laporan keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti laporan arus kas dan laporan lainnya serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan). Laporan keuangan bank hampir sama dengan laporan perusahaan yaitu berupa neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan, perbedaannya terletak pada bank yang mewajibkan untuk menyertakan laporan komitmen dan kontinjensi yang memberikan gambaran berupa sifat tagihan maupun kewajiban pada tanggal laporan.

Secara rinci telah disebutkan bahwa, laporan keuangan adalah laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, asosiasi atau organisasi bisnis yang terdiri dari

²⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 280.

neaca, laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Ada beberapa tujuan dari laporan keuangan yaitu:

1. Memberikan informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan (termasuk bank) pada saat tertentu.
2. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi tertentu.
3. Memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi dan potensi suatu perusahaan.
4. Memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan.

Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan untuk mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Analisis keuangan yang mencakup analisis rasio keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan di bidang *financial* akan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa yang akan datang. Laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil

yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Keadaan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan.²⁶

c. Evaluasi Kinerja keuangan perbankan

Tingkat keberhasilan kinerja perusahaan dapat diketahui dari evaluasi atau penilaian kinerja. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Menurut Umar, evaluasi merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standart tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Terdapat beberapa alata atau metode untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan, rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perbankan sangat bervariasi. Yang dimaksud dengan rasio dalam menganalisis laporan keuangan adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur

²⁶ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 876.

lainnya dalam laporan keuangan. Hubungan antara unsur laporan keuangan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis sederhana. Pada umumnya rasio yang dihitung untuk menilai kinerja suatu bank dibagi menjadi 3 tipe dasar²⁷, yaitu:

1. Rasio Likuiditas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban financial jangka pendeknya atau kewajiban yang telah jatuh tempo. Rasio likuiditas yang sering digunakan dalam menilai kinerja suatu bank diantaranya adalah:
 - a) *Cash Asset Ratio*, yaitu likuiditas minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam membayar kembali pinjaman jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi likuiditas bank, namun dalam praktiknya akan mempengaruhi profitabilitas.
 - b) *Reserve Requirement (RR)*, yaitu ketentuan dari masing-masing bank untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dalam bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening bank.
 - c) *Loan to Deposit Ratio*. Yaitu rasio antara jumlah seluruh kredit yang diberikan bank dengan dana yang diberikan oleh

²⁷ Mulyadi, *Akuntansi Manajemen; Konsep, Manfaat dan Rekayasa* (Yogyakarta:STIE YKPN, 2001), 143.

bank. Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan dengan sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar.

d) *Loan to Asset Ratio* (LAR), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditasnya semakin kecil karena jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.

2. Rasio Rentabilitas, yaitu alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank. Diantaranya adalah:

a) *Return On Asset* (ROA), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar rasio ini maka semakin besar juga tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik pula posisi bank dalam penggunaan

aset.

- b) *Return On Equity* (ROE), yaitu perbandingan antara laba bersih dengan modal.
 - c) Rasio Beban Operasional (BOPO), yaitu perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional.
 - d) *Net Profit Margin* (NPM), adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya.²⁸
3. Rasio Solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengetahui perbandingan antara volume (jumlah) dana yang diperoleh dari berbagai hutang (jangka pendek dan jangka panjang) serta sumber-sumber lain di luar modal bank sendiri dengan jumlah penanaman dana pada berbagai aktiva yang dimiliki. Rasio ini terdiri atas:
- a) *Capital Adequacy Ratio* (CAR), adalah rasio yang memperlihatkan aktiva bank yang mengandung risiko. Rasio ini digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang

²⁸ Ibid.,

mengandung atau menghasilkan risiko.

b) *Debt to Equity* (DER), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutup sebagian atau seluruh hutang baik jangka panjang ataupun jangka pendek dengan dana yang berasal dari bank. Rasio ini mengukur seberapa besar total pasiva yang terdiri atas pesentase modal dibandingkan dengan besarnya hutang.

Perhitungan rasio-rasio diatas digunakan untuk menilai posisi kinerja suatu bank, memberikan gambaran yang jelas tentang baik atau tidaknya kegiatan operasional suatu bank, yang dilihat dari posisi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan bank tersebut. Dalam penelitian ini, untuk mengevaluasi kinerja keuangan perbankan maka kinerja keuangan diproksikan dengan ROA. Menurut Syamsuddin, *Return On Assets* (ROA) merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba, sehingga apabila nilai suatu ROA semakin tinggi maka dapat dikatakan semakin bagus kinerja suatu perusahaan. Rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mengelola setiap nilai *assets* yang mereka miliki untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. *Assets* merupakan keseluruhan harta perusahaan

yang diperoleh dari modal sendiri maupun modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva untuk kelangsungan hidup perusahaan. ROA yang telah diketahui digunakan perusahaan untuk menilai efisiensi aktivitya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan.²⁹

ROA merupakan suatu ukuran keseluruhan profitabilitas perusahaan. Profitabilitas perusahaan harus dilihat sebagai faktor pendorong dalam memantau aspek likuiditas dan solvabilitas. Dalam jangka panjang perusahaan harus menghasilkan keuntungan sehingga mampu membayar kewajibannya. Sedangkan dalam jangka pendek, kerugian akan menurunkan likuiditas perusahaan, dan lebih lanjut profitabilitas perusahaan akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan dari luar.³⁰ ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{total aktiva}}$$

Secara khusus tujuan mengevaluasi kinerja perbankan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetagui tingkat keberhasilan pengelolaan

²⁹ Lukman Syamsuddin, *Manajemen Keuangan Perusahaan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 63.

³⁰ Ahmad Rodoni dan Herni Ali, *Manajemen Keuangan Modern* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 192.

keuangan suatu bank yang dicapai selama tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

- 2) Untuk mengetahui tingkat kemampuan suatu bank dalam mendayagunakan aset yang dimiliki secara efisien.
- 3) Untuk mengetahui apakah bentuk strategi implementasi peningkatan kinerja yang dicapai sudah cukup efektif dan efisien.

2. *Good Corporate Governance*

a. *Pengertian Good Corporate Governance*

Pembahasan mengenai *Corporate Governance* memiliki arti yang beraneka ragam baik dari segi konsep ataupun analisisnya. *Corporate Governance* adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan.³¹ Secara umum *Corporate Governance* berkaitan dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas diantara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dapat mencapai tujuan-tujuan usaha secara

³¹ Imam Sjahputra Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance* (Jakarta: Harvarindo, 2002), 1.

optimal.³² Secara makro ekonomi *Corporate Governance* yang tidak dijalankan dengan baik menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya masalah krisis ekonomi, dan juga dapat menyebabkan munculnya beberapa resiko usaha termasuk di dunia perbankan. Istilah *Governance* sendiri lebih ditujukan untuk sistem pengendalian dan pengaturan usaha dalam arti lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para *stakeholder*.

Beberapa definisi *Corporate Governance* diantaranya: Pertama, menurut OECD (*Organization for Economic Corporation and Development*) *Corporate Governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board* dan pemegang saham serta pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate Governance* juga mensyaratkan adanya struktur , perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja.³³ Kedua, menurut Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber

³² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 179.

³³ Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), 2004, 1.

perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham atau masyarakat sekitar secara keseluruhan.³⁴ Ketiga, menurut Azhar Kasim *Governance* adalah proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan (sosial, ekonomi, politik dan sebagainya) dalam suatu negara serta penggunaan sumber daya (alam, keuangan dan manusia) dengan cara yang sesuai dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.³⁵ Keempat, *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengelola perusahaan, kreditor, pemerintah, karyawan dan *stakeholder* internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan dari *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).³⁶ Kelima,

³⁴ Muh. Arief Effendi, *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 1-2.

³⁵ Sedarmayanti, *Good Governance dan Good Corporate Governance* (Bandung: Mandar Maju, 2012) 52-53.

³⁶ Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI), 2000, 2.

Kaen menyatakan *Corporate Governance* pada dasarnya menyangkut masalah siapa (*who*) yang seharusnya mengendalikan jalannya kegiatan korporasi dan mengapa (*why*) harus dilakukan pengendalian terhadap jalannya kegiatan korporasi. Yang dimaksud dengan siapa adalah para pemegang saham, sedangkan yang dimaksud mengapa adalah karena adanya hubungan antara pemegang saham dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak-pihak utama dalam *Corporate Governance* adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi, sedangkan pemangku kepentingan lainnya yaitu karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator lingkungan serta masyarakat luas.³⁷

Sedangkan *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang sehat. Gerald Charraeaux mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagaimana dikutip oleh Prasetyantoko yaitu keseluruhan mekanisme yang mempengaruhi sekaligus membatasi kekuasaan pada lembaga dalam bentuk pengambilan keputusan oleh pengendali

³⁷ Fred R Kaen, *A Blueprint for corporate Governance; Stregy, Accountability, and the Preservation of Shareholder Value* (USA: AMACOM, 2003), 17.

perusahaan.³⁸ Dalam literatur lain disebutkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu kesatuan yang menyeluruh yang mencakup aspek budaya, hukum dan kelengkapan institusional lain baik berupa mekanisme yang didasarkan pada konsep pengendalian korporasi disertai dengan sistem akuntabilitas dari pihak yang memegang kendali.³⁹

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan perusahaan dan masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan karena *Good Corporate Governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Umumnya *Good Corporate Governance* menyangkut orang (moralitas), etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik.⁴⁰

b. Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Prinsip dasar dari *Good Corporate Governance*, pada

³⁸ A. Prasetyantoko, *Corporate Governance: Pendekatan Institusional* (Jakarta: Gramedia, 2008), 38.

³⁹ Akhmad Syahroza, *Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan Teori Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN* (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2005), 5.

⁴⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management for Islamic Bank* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), 38

dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Secara umum penerapan prinsip *Good Corporate Governance* menurut OECD, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

- 1) Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
- 2) Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
- 3) Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
- 4) Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholder* terhadap perusahaan.
- 5) Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum⁴¹

Dalam pedoman *Good Corporate Governance* perbankan Indonesia, GCG pada perbankan harus mengandung lima prinsip utama yaitu: keterbukaan (*Transparency*) dalam melaksanakan kegiatan usahanya, memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate value*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin

⁴¹ Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), 2004, 3.

dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggungjawab bank (*responsibility*), objektif dan beba dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dan efisien akan menjadikan seluruh proses aktivitas berjalan dengan baik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan baik yang bersifat finansial maupun non finansial akan berjalan dengan baik pula.⁴² Dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip diatas bank perlu memperhatikan hal berikut:

- 1) Keterbukaan (*Transparancy*), adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan dan pemegang kepentingan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif

⁴² Binhadhi dkk, *Pedoman Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance: 2004), 2.

untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga hal penting berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditor dan pemangku kepentingan lainnya.⁴³

- a) Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholder* sesuai dengan haknya.
- b) Informasi yang harus diungkapkan tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi misi, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan resiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
- c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia, jabatan dan hak-hak pribadi.

⁴³ Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2010), 72-73.

- d) Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.⁴⁴
- 2) Akuntabilitas (*accountability*). Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien. Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara direksi, komisaris dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.⁴⁵
- a) Bank harus menetapkan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing organ perusahaan yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- b) Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank

⁴⁴ Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, 2004), 3.

⁴⁵ Abdullah, *Corporate Governance*, 72-73.

mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggungjawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.

c) Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.

d) Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *reward and punishment system*.⁴⁶

3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*). Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan diantaranya: hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggungjawab kepada *shareholder* juga kepada *stakeholder* lainnya.⁴⁷

⁴⁶ Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia, 3.

⁴⁷ Abdullah, *Corporate Governance*, 72-73.

- a) Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practice*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
- b) Bank harus bertindak sebagai *Good Corporate Citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggungjawab sosial.⁴⁸
- 4) Independensi (*independency*), untuk melancarkan pelaksanaan azas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini enuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komisaris, komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus objektif dan tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu.⁴⁹
- a) Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak

⁴⁸ Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia, 4.

⁴⁹ Abdullah, *Corporate Governance*, 72-73.

wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

b) Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.⁵⁰

5) Kewajaran (*Fairness*). Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan *fairness* dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil diantara beragam kepentingan dalam perusahaan. Prinsip kewajaran menuntut adanya perlakuan yang sama terhadap *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mencakup tentang kejelasan hak, sistem hukum dan penegak peraturan bagi perlindungan *stakeholder* dari berbagai bentuk kecurangan.⁵¹

a) Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*)

⁵⁰ Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia, 4.

⁵¹ Abdullah, *Corporate Governance*, 72-73.

b) Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukan.⁵²

Penerapan prinsip GCG kedalam perusahaan di Indonesia akan berhasil dengan baik jika dilakukan dengan berpegang pada pedoman pokok, antara lain: (a) diakuinya hak-hak pemegang saham dengan suatu prosedur RUPS yang layak. (b) adanya pengaturan tentang direksi dan komisaris, yang berkenaan dengan fungsi, komposisi, prosedur rapat, sistem pengangkatan, penggajian dan sebagainya. (c) adanya sistem audit yang baik yang menyangkut dengan auditor eksternal, komite audit, informasi dan kerahaasiaan audit. (d) adanya sekretaris perusahaan dengan kejelasan fungsi, persyaratan, pertanggungjawaban, peranannya dalam mengungkapkan informasi perusahaan dan pengawasan informasi internal. (e) adanya pengaturan tentang *stakeholder* dari suatu perusahaan terutama menyangkut hal-hak dan keikutsertaannya dalam pengawasan manajemen perusahaan. (f) keterbukaan informasi perusahaan yang akurat dan tepat waktu. (g) adanya pengaturan yang jelas tentang kerahaasiaan

⁵² Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia, 4.

perusahaan yang diemban oleh komisaris dan direksi. (h) pencegahan dilakukannya peyalahgunaan informasi orang dalam. (i) pencegahan terhadap pelanggaran etika bisnis dan pencegahan dilakukannya suap menyuap. (j) pencegahan dilakukannya sumbangan tidak layak. (k) kejelasan tanggungjawab perusahaan kepada perdagangan yang baik, masyarakat dan lingkungannya.⁵³

c. Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

- 1) Proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat.
- 2) Meminimalkan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan.
- 3) Nilai perusahaan dimata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelola perusahaan tempat mereka berinvestasi.
- 4) Meningkatnya otivasi dan kepuasan kerja karyawan.
- 5) Tingkat kepercayaan para *stakeholder* kepada perusahaan akan meningkat sehingga citra perusahaan akan naik.

⁵³ Misahardi Milaharta, *Hak Perdagangan Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporat Governance* (Jakarta: PPSUI, 2002), 75.

6) Meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.⁵⁴

d. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Good Corporate Governance*

1) Faktor internal

a) Budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.

b) Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan.

c) Manajemen pengendalian risiko yang didasarkan pada kaidah standart *Good Corporate Governance*.

d) Terdapat sistem audit yang efektif

e) Keterbukaan informasi bagi publik

2) Faktor eksternal

a) Adanya sistem hukum yang baik.

b) Dukungan publik/lembaga pemerintah.

c) Terbangunnya sistem tata nilai sosial.⁵⁵

⁵⁴ Azhar Maksum, *Tinjauan atas Good Corporate Governance di Indonesia* (Medan: USU, 2005), 8.

⁵⁵ M. Ahmad Daniri, *Good Corporate Governance; Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia* (Jakarta: PT. Ray Indonesia 2005), 20.

3. *Sharia compliane*

a. Pengertian

Kepatuhan syariah pada bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait dimana budaya kepatuhan adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah. Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante (preventif)*⁵⁶ untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan atau otoritas pengawas lain yang

⁵⁶ Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dijelaskan bahwa upaya yang bersifat *ex-ante (preventif)* dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil resiko kegiatan usaha Bank.

berwenang.⁵⁷

Kepatuhan syariah memiliki standart Internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Finansial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tat kelola lembaga (*Corporate Governance*). Kepatuhan syariah secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumberdaya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal dan distribusi kekayaan. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi meliputi sistem, teknik dan identitas perusahaan. Karena itu budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi dan *image* perusahaan merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah pada bank syariah. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami.⁵⁸

Ditinjau dari sudut pandang masyarakat khususnya bagi pengguna jasa bank syariah, kepatuhan syariah merupakan inti

⁵⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum Pasal 1 Butir 5 dan 6.

⁵⁸ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 145.

dari integritas dan kredibilitas bank syariah. Eksistensi bank syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan pelaksanaan ajaran secara menyeluruh termasuk dalam kegiatan penyaluran dana melalui bank syariah. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat didasarkan dan dipertahankan melalui pelaksanaan prinsip hukum Islam yang diadaptasi dalam peraturan operasional institusi tersebut. tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih atau melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah.⁵⁹

b. Fungsi kepatuhan bank

- 1) Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank.
- 2) Mengelola resiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank.
- 3) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan uasaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip syariah

⁵⁹ Ade Soryan Mulazid, "Pelaksanaan *Sharia Compliance* pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Jakarta)," *Jurnal Madania*, Vol. 20, No. 1, Juni 2016, 37-54.

bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- 4) Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang.⁶⁰

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan beedasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁶¹

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor prinsip-prinsip syariah, diantaranya meliputi:

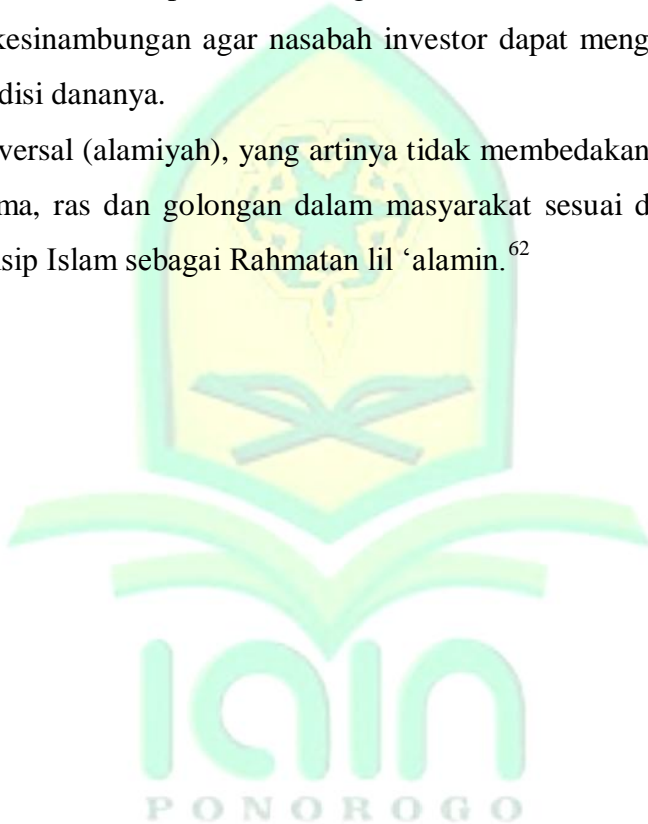
- a) Keadilan dan Keseimbangan (*'adl wa tawazun*), yaitu berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai dengan kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
- b) Kemaslahatan (*mashlahah*).
- c) Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), pengguna dana serta lembaga keuangan itu sensiri

⁶⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum Bab 2 Pasal 3 tentang Fungsi Kepatuhan Bank.

⁶¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1 butir 12.

sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.

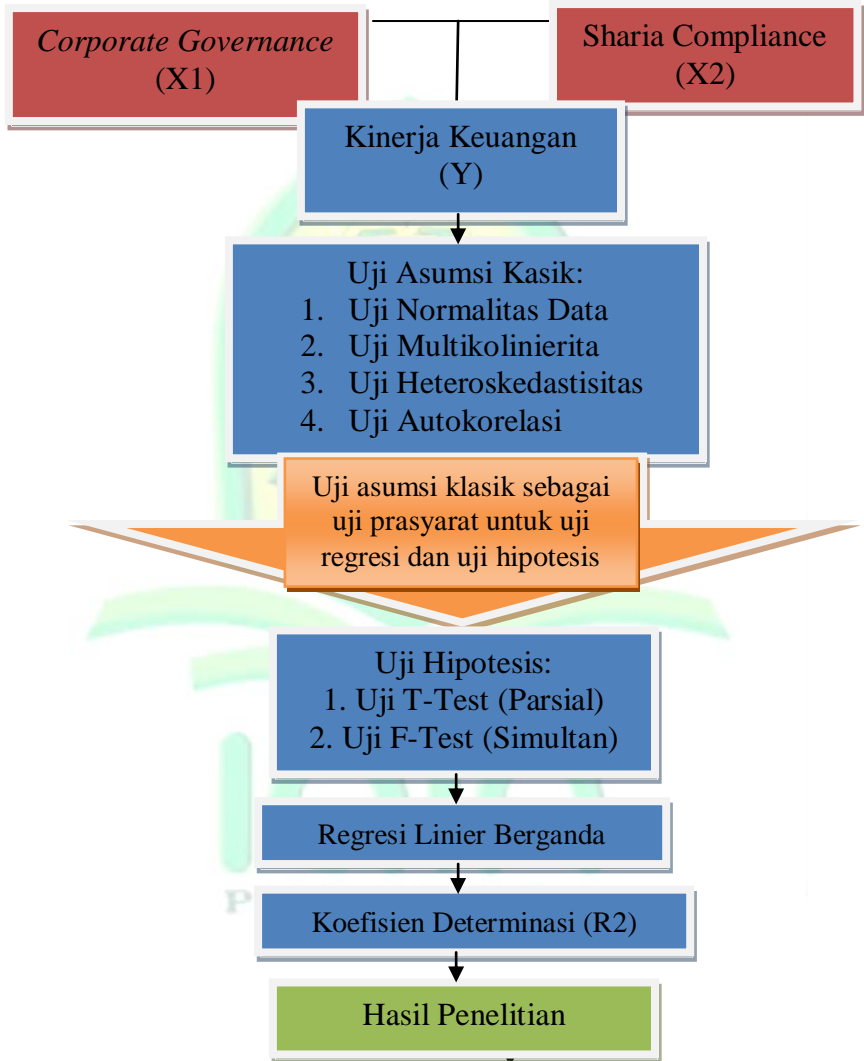
- d) Transparansi, dimana lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
- e) Universal (alamiyah), yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai Rahmatan lil ‘alamin.⁶²



⁶² <https://www.ojk.go.id/konsep-dasar-dan-prinsip-prinsip-dasar>, diakses pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 09.30 WIB.

C. Prosedur Penelitian

Gambar 1.1 Prosedur Analisis Penelitian



D. Definisi Operasional Variabel

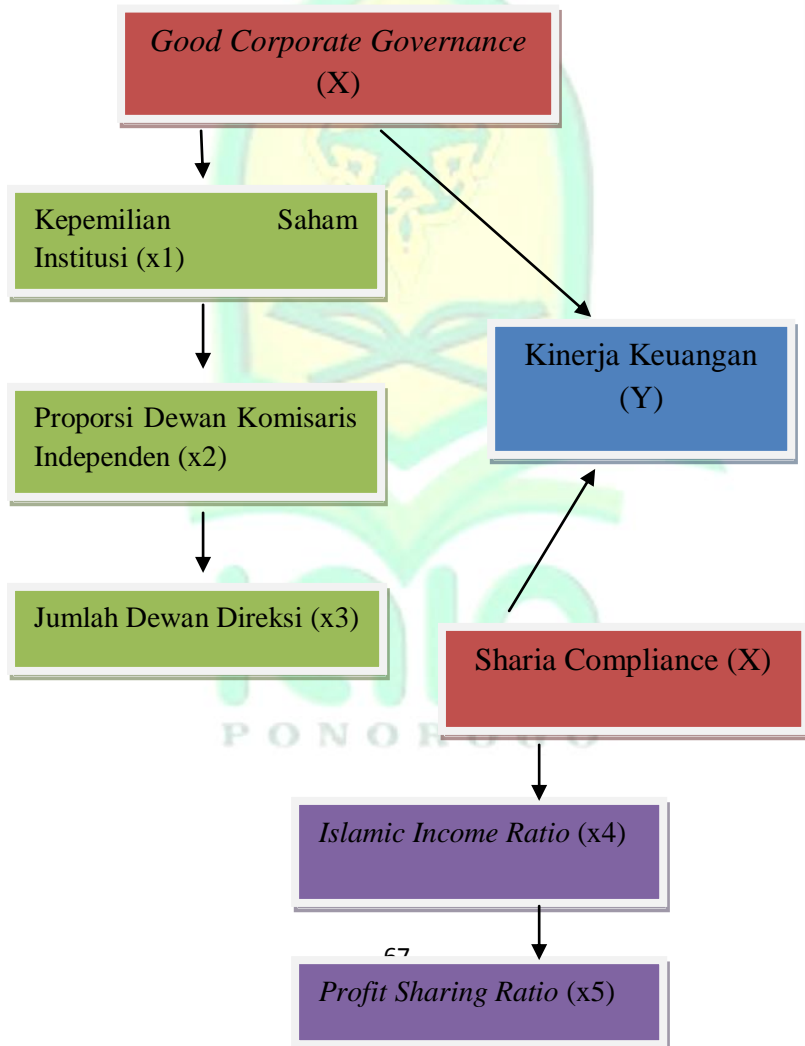
Untuk menghindari kesalahfahaman dalam memahami kata dan istilah teknis variabel yang terdapat dalam judul pada penelitian ini, maka peneliti perlu untuk memberikan penegasan istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang sehat, yaitu sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja bank syariah agar berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemangku kepentingan perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan.
2. *Sharia Compliance* adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, terutama pada prinsip syariah.
3. *Kinerja keuangan* merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

E. Kerangka Berfikir

Berdasarkan definisi operasional variabel yang telah diuraikan diatas, maka kerangka berfikir yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2 Kerangka Berfikir



Keterangan:

Dari kerangka pemikiran yang telah dipaparkan diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. variabel *Good Corporate Governance* yang terdiri dari *kepemilikan saham institusional* (x1), *proporsi dewan komisaris* (x2), jumlah dewan direksi (x4), yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja keuangan.
2. variabel *Sharia Compliance* terdiri dari *Islamic Income Ratio* (x4), dan *Profit Sharing Ratio* (x5), yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja keuangan
3. variabel *Good Corporate Governance* yang terdiri dari *kepemilikan saham institusional* (x1), *proporsi dewan komisaris* (x2), jumlah dewan direksi (x4), dan variabel *Sharia Compliance* yang terdiri dari *Islamic Income Ratio* (x4), dan *Profit Sharing Ratio* (x5), yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja keuangan.

F. Hipotesis

Sugiyono mengatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian yang telah dinyatakan oleh peneliti dalam bentuk kalimat tanya, oleh karena itu rumusan masalah disusun dalam bentuk

pertanyaan.⁶³ Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka dalam penelitian ini dapat dibuat hipotesis berupa:

1. H_01 = Semua variabel

Kepemilikan Saham Institusional: tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

H_a1 = Semua variabel

Kepemilikan Saham Institusional: berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

2. H_02 = Semua Variabel

Proporsi Dewan Komisaris Independen: tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

H_a2 = Semua variabel

Proporsi Dewan Komisaris Independen: berpengaruh

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development* (Bandung: Alfabeta, 2015), 64.

signifikan terhadap *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

3. H_{03} = Semua variabel

Jumlah Dewan Direksi: tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

H_{a3} = Semua variabel

Jumlah Dewan Direksi: berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

4. H_{04} = Semua variabel

Islamic Income Ratio: tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

H_{a4} = Semua variabel

Islamic Income Ratio: berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

5. H_{05} = Semua variabel

Profit Sharing Ratio: tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

H_{a5} = Semua variabel

Profit Sharing Ratio: berpengaruh signifikan terhadap

Return On Asset pada Perbankan Syariah di Indonesia.

6. H_{06} = Semua variabel

Variabel Kepemilikan Saham Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Jumlah Dewan Direksi, *Islamic Income Ratio*, dan *Profit Sharing Ratio* secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

H_{a6} = Semua variabel

Variabel Kepemilikan Saham Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Jumlah Dewan Direksi, *Islamic Income Ratio*, dan *Profit Sharing Ratio* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif⁶⁴ yaitu suatu pendekatan dengan melakukan pengujian hipotesis, pengukuran data dan pembuatan kesimpulan. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang terstruktur dan mengkuantifikasikan data agar dapat digeneralisasikan.

Penelitian ini bersifat *Assosiatif Kausal* Kuantitatif, yaitu menjelaskan pengaruh antara variabel independent yaitu penerapan *Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* yang dikaitkan dengan variabel *dependent* yaitu kinerja keuangan dengan data penelitian berupa angka dan analisis statistik.⁶⁵ Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 203.

⁶⁵ Ghufon, M. N dan Risnawita R, *Teori-teori Psikologi* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2010), 13.

bantuan aplikasi komputer statistika SPSS versi 16.⁶⁶

B. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, desain yang digunakan adalah *deskriptif-kuantitatif*, yaitu data yang diperoleh dari sampel populasi dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan. Penelitian deskriptif sendiri adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel ataupun lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.⁶⁷ Dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis *Good Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* dalam meningkatkan kinerja keuangan pada Perbankan Syariah di Indonesia.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki jumlah banyak dan luas.⁶⁸ Karena penelitian ini menggunakan data sekunder maka populasi yang digunakan

⁶⁶ Ibid., 2.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2010), 11.

⁶⁸ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 137.

adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang tercantum dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berjumlah 14 bank. Sedangkan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan metode *purposive sampling*, dimana pemilihan sampel yang diambil sesuai dengan kriteria pemilihan sampel. *Purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.⁶⁹ Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap baik secara triwulan maupun tahunan pada periode 2013-2019.

D. Data Dan Sumber Data

Data ialah sekumpulan informasi yang dikumpulkan untuk menjawab suatu permasalahan dalam suatu penelitian.⁷⁰ Data juga merupakan sekumpulan informasi yang dicari untuk menjawab suatu pertanyaan. Data merupakan aspek penting dalam penelitian karena data inilah yang dijadikan bahan

⁶⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 155.

⁷⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2010), 23.

analisis atau kajian yang dilakukan. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data panel, yaitu menggabungkan antara data *time series* dengan data *cross section*. Dalam sebuah penelitian sumber data diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder, data sekunder merupakan data tambahan dari sumber sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka baik berupa buku-buku ataupun penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari web resmi Bank Indonesia (BI) yaitu www.bi.go.id dan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go.id.

E. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel merupakan suatu objek yang sudah ditentukan oleh peneliti pada awal sebelum dilakukan penelitian dan menghasilkan sebuah informasi yang memiliki hasil atau sebuah kesimpulan.⁷¹ Pada penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu *independent* (variabel bebas) dan *dependent* (variabel terikat):

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 60.

1. Variabel terikat

Variabel terikat disebut juga variabel *dependent* merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.⁷² Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang disimbolkan dengan huruf (Y). Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA). ROA dipilih sebagai ukuran kinerja keuangan karena dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik kemampuan bank dalam mengatur asset yang dimiliki.

2. Variabel bebas

Variabel bebas disebut juga variabel *independent* merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat.⁷³ Terdapat dua variabel bebas dalam penelitian ini yang disimbolkan dengan huruf (X), yaitu:

1. *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) yang terdiri dari kepemilikan saham institusional (X1), proporsi dewan komisaris independen (X2), dan jumlah dewan direksi (X3).
2. *Sharia Compliance* (kepatuhan syariah) yang terdiri dari

⁷² Ibid.,

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 61.

Islamic Income Ratio (X4), Profit Sharing Ratio (X5).

Tabel 3.A Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Sumber
<i>Good Corporate Governance</i>	Kepemilikan saham institusional Proporsi dewan komisaris independen Jumlah dewan direksi	PBI Nomor 8/4/PBI/2006
<i>Sharia Compliance</i>	<i>Islamic Income Ratio</i> <i>Profit Sharing Ratio</i>	Asrori, “Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah”, <i>Tesis</i> , 2014.
Kinerja keuangan	<i>Return On Asset (ROA)</i>	Anita Nur Khasanah, “Pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index Terhadap Profitability Perbankan Syariah Indonesia,” <i>Jurnal Nominal</i> , Vol V No. 1, 2016.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dimana alat pengumpul data nya merupakan form pencatatan dokumen dan sumber datanya dari laporan keuangan yang telah di publikasikan di web Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan web resmi pada masing-masing Bank Umum Syariah.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian agar memperoleh suatu kesimpulan.⁷⁴

1. Analisis statistik deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua variabel bebas yaitu *Good Corporate Governance* yang terdiri dari kepemilikan saham institusional, proporsi dewan komisaris independen, jumlah dewan direksi, dan *Sharia Compliance* yang terdiri dari *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio*. Sedangkan variabel

⁷⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 235.

terikat dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA). Deskripsi variabel tersebut disajikan untuk mengetahui nilai-nilai (mean) minimum, maksimum dan standart deviasi dari variabel yang diteliti.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan tahapan penting yang dilakukan dalam proses analisis regresi. Apabila tidak terjadi gejala asumsi klasik diharapkan dapat dihasilkan model regresi yang handal sesuai kaidah BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*), yang menjadikan model regresi yang tidak bias dan handal sebagai penaksir.⁷⁵ Uji asumsi klasik terdiri dari Uji Normalitas (*Normality*), Uji Multikolinearitas (*Multicollinierity*), Uji Heteroskedastisitas (*Heteroscedasticity*) dan Uji Autokorelasi.

a. Uji Normalitas (*Normality*)

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki

⁷⁵ Ahmad Suminto, "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) dan Corporate Image Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Pada Nasabah PT BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo," *Tesis* (Ponorogo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Ponorogo, 2019), 93.

distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.⁷⁶

Uji normalitas berguna untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. *Screening* terhadap normalitas data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis *multivariate*, khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Walaupun normalitas suatu variabel tidak selalu diperlukan dalam analisis akan tetapi hasil uji statistik akan lebih baik jika semua variabel berdistribusi normal.⁷⁷

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu:

1) Analisis Grafik

Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal, distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal, dan *plotting* data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika

⁷⁶ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), 154.

⁷⁷ *Ibid.*, 29-30.

distribusi data residual normal, maka garis yang diagonal dan *ploting* data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.⁷⁸ Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residunya. Dasar pengambilan keputusan:

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.⁷⁹

2) Analisis Statistik

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan jika tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, dianjurkan di samping

⁷⁸ Ibid., 154.

⁷⁹ Ibid., 154-156.

uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Salah satu uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik *non-parametik* Kolmogorov-Smirnov (K-S) pada *alpha* sebesar 5%. Jika nilai signifikan dari pengujian Kolmogorov-Smirnov (KS) lebih besar dari 0,05 berarti data normal, jika tidak maka data tidak akan berdistribusi normal.⁸⁰

b. Uji Multikolinearitas (*Multicollinierity*)

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (*independent*). Jika variabel bebas (*independent*) saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas (*independent*) yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas (*independent*) sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas yaitu sebagai berikut:

- 1) Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel *independent* banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat (*dependent*).
- 2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas

⁸⁰ Ibid., 158-159.

(*independent*). Jika antar variabel *independent* ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas.

- 3) Multikolonieritas dapat juga dilihat dari: nilai *tolerance* dan lawannya, serta *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cut off tolerance* lebih kecil dari 0,10 ($< 0,10$) dan VIF lebih besar dari 10 (> 10) berarti terdapat multikolinearitas. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas (*independent*) manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas (*independent*) lainnya.⁸¹

c. Uji Heteroskedastisitas (*Heteroscedasticity*)

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatteplot* antara

⁸¹ Ibid.

variabel *dependent* (terikat) dengan residualnya. Apabila grafik yang ditunjukkan dengan titik membentuk suatu pola tertentu maka terjadi heteroskedastisitas dan apabila polanya acak maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain itu heteroskedastisitas dapat diuji dengan uji *park* maupun uji *Glejser* (*Glejser Test*), yaitu dengan melakukan analisis regresi variabel *independent* terhadap nilai *absolute* residual. Dalam uji *Glejser* jika tingkat signifikan diatas 5% atau jika t hitung $>$ t tabel, maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun jika tingkat signifikan dibawah 5% atau t hitung $<$ t tabel maka ada gejala heteroskestisitas.⁸²

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (periode sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka terdapat problem autokorelasi.⁸³ Autokorelasi terjadi apabila penyimpangan pada periode $t-1$ atau terjadi korelasi diantara kelompok observasi yang diurutkan menurut waktu (pada data *time series*). Untuk menguji autokorelasi

⁸² Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate*, 108.

⁸³ *Ibid.*, 154.

digunakan uji Durbin Watson dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika $d < dl$, berarti terdapat autokorelasi positif.
- 2) Jika $d > (4-dl)$, berarti terdapat autokorelasi negatif.
- 3) Jika $du < d < (4-dl)$, berarti tidak terdapat autokorelasi.
- 4) Jika $dl < d < du$ atau $(4-du)$, berarti tidak dapat disimpulkan.⁸⁴

3. Analisis regresi Linier Berganda

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel terikat (*dependent*) dengan satu atau lebih variabel bebas (*independent*), dengan tujuan untuk mengistemasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel terikat (*dependent*) berdasarkan nilai variabel *independent* yang diketahui.⁸⁵

Analisis regresi dapat dimanfaatkan untuk mengetahui bagaimana variabel *dependent* (*criterium*) dapat diprediksikan melalui variabel *independent* (*predictor*). Dampak dari penggunaan analisis regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik atau menurunnya variabel *dependent* dapat dilakukan melalui menaikkan dan menurunkan keadaan

⁸⁴ Ibid., 154

⁸⁵ Ibid., 93.

variabel *independent*.⁸⁶

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas secara parsial maupun bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat dalam penelitian ini menggunakan analisis SPSS (*Statistical Product and Service Solution*), juga menggunakan analisis persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = *Return On Asset*

a: nilai konstanta

β_1 - β_5 : koefisien regresi

X1 = Kepemilikan Saham Institusional

X2 = Proporsi Dewan Komisaris Independent

X3 = Jumlah Dewan Direksi

X4 = *Islamic Income Ratio*

X5 = *Profit Sharing Ratio*

e: *error*

4. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis, maka pengujian dilakukan

⁸⁶ Husein umar, *Metode Penelitian Untuk Tesis dan Skripsi* (Jakarta: Rajawali 2013), 242.

dengan menggunakan:

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel *dependent*. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel *independent* dalam menjelaskan variasi variabel *dependent* amat terbatas. Nilai yang mendekati satu *berate* variabel-variabel *independent* memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel *dependent*.⁸⁷

b. Uji Parsial (T-test)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

$$H_0: b_i = 0$$

Artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel *independent* terhadap variabel *dependent*.

$$H_a: b \neq 0$$

⁸⁷ Ghozali, *Aplikasi Analisis*, 87.

Artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel *independent* terhadap variabel *dependent*.

Ho diterima, apabila $T \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ pada $\alpha = 0.05$

Ha diterima, apabila $T \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ pada $\alpha = 0.05$

c. Uji Simultan (F-test)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel *independent* secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel *dependent*.⁸⁸ Melalui uji statistik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Ho: $b_1 = b_2 = 0$

Artinya secara bersama-sama atau simultan tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel *independent* terhadap variabel *dependent*.

Ha: $b_1 \neq b_2 \neq 0$

Artinya secara bersama-sama atau simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Kriteria pengambilan keputusannya yaitu :

Ho diterima, apabila $F_{\text{hitung}} < F \text{ tabel}$ pada $\alpha = 0.05$

Ha diterima, apabila $F_{\text{hitung}} > F \text{ tabel}$ pada $\alpha = 0.05$

Dalam proses pengolahan data, penulis mempergunakan

⁸⁸ Ibid., 164.

aplikasi komputer dengan program SPSS versi 16.0 untuk mempermudah dan mempercepat pengolahan data. SPSS adalah suatu *software* yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik baik untuk *statistic parametik* maupun *non-parametik* dengan basis windows.⁸⁹



⁸⁹ Ibid., 15.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. **Gambaran Data Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah dalam kurun waktu 2013-2019. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia yang secara konsisten melaporkan laporan keuangan baik secara triwulan ataupun tahunan pada selama kurun waktu 7 tahun yaitu tahun 2013-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa variabel *Good Corporate Governance* yang terdiri dari kepemilikan saham institusional, proporsi dewan komisaris independen, jumlah dewan direksi, serta variabel *Sharia Compliance* yang terdiri dari *Islamic Income Ratio* (ISIR), dan *Profit Sharing Ratio* (PSR), sedangkan kinerja keuangan bank diukur dengan menggunakan rasio *Return On Assett* (ROA). Objek pada penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia yang memenuhi kriteria penerapan

operasional variabel dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang dibutuhkan pada penelitian ini. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013-2019.
2. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap baik secara triwulan maupun tahunan secara berturut-turut dari tahun 2013-2019.
3. Bank umum syariah yang memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu yang mempublikasikan laporan mengenai *Good Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* secara berturut-turut dari tahun 2013-2019.

Istilah *Corporate Governance* secara luas telah dikenal dalam dunia usaha. *Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengawasan pada suatu perusahaan yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja semaksimal mungkin tanpa merugikan *stakeholdernya*⁹⁰. *Corporate Governance* sebagai variabel independen diukur dengan menggunakan mekanisme *Corporate Governance* yang merupakan syarat-syarat pelaksanaan sistem dalam suatu badan usaha agar dapat

⁹⁰ Sutoyo Siswanto dan E. John Aldridge, *Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan yang Sehat* (Jakarta:PT. Damar Mulia Pustaka, 2005), 2.

memastikan bahwa pihak internal dapat memenuhi kepentingan *stakeholder*. Mekanisme *Corporate Governance* yang baik akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Mekanisme *Corporate Governance* terdiri dari dimensi-dimensi *Corporate Governance* yang terbagi menjadi dua yaitu: internal diantaranya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan ukuran dewan direksi dan eksternal yaitu utang.⁹¹ Dalam penelitian ini indikator yang diambil adalah kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, dan ukuran/jumlah dewan direksi.

Secara umum konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola resiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen risiko. Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud, karakteristis, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam keuangan Islam

⁹¹ Ibid.,

meliputi pelarangan riba, pelanggaran penipuan, penghindaran spekulasi, dan investasi yang diharamkan.⁹²

Terdapat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan syariah secara kuantitatif diantaranya *Islamic Investment Ratio*, *Profit Sharing Ratio* dan *Islamic Income Ratio*. Dalam penelitian ini hanya menggunakan *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio*.⁹³

Kinerja keuangan sebagai variabel dependen diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas yaitu *Return On Asset*. Rasio ini merupakan sebuah pengukuran mengenai efektifitas aset yang digunakan untuk menghasilkan laba. Efektifitas berkaitan dengan kemampuan pihak manajer dalam mengelola sumber daya, jadi *Return On Asset* merupakan pengukuran mengenai kemampuan pihak manajer dalam mengelola aset yang dihasilkan untuk menghasilkan laba.

⁹² Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 76.

⁹³ Hameed Shalul, "Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks" dalam [https://iiu.edu.my/iaw/studentsPapers_files/alternative_accounting_performance_measures_forislamic\)banks.html](https://iiu.edu.my/iaw/studentsPapers_files/alternative_accounting_performance_measures_forislamic)banks.html), diakses pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 pukul 16.47 WIB.

Return On Asset dapat diperoleh dengan membandingkan *net profit* terhadap total aset.⁹⁴

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik dengan menggunakan persamaan analisis linier berganda. Analisis data dimulai dengan mengolah data dengan menggunakan microsoft excel kemudian dilakukan pengujian kualitas data dan uji asumsi klasik kemudian menggunakan analisis linier berganda dengan menggunakan software SPSS versi 16. Prosedur dimulai dengan memasukan variabel-variabel penelitian ke program SPSS dan akan menghasilkan output yang sesuai dengan analisis yang ditentukan. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, diperoleh 7 bank yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel yang diamati selama periode 7 tahun yaitu tahun 2013-2019.

Tabel 4.A.1 Penarikan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Bank umum syariah yang ada di Indonesia dan terdaftar dalam otoritas jasa keuangan	14
2	Bank Umum Syariah yang memiliki	7

⁹⁴ Siswanto, *Good Corporate*, 65.

	Laporan tahunan yang lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan penulis	
3	Jumlah tahun pengamatan	7
4	Total sampel penelitian	49

Tabel 4.A.2 Sampel Bank yang Digunakan Penelitian

No	Nama Bank
1.	Bank Muamalat Indonesia
2.	Bank BRISyariah
3.	Bank BNISyariah
4.	Bank Mega Syariah
5.	Bank Panin Dubai Syariah
6.	Bank Mandiri Syariah
7.	Bank BCASyariah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019

B. Deskripsi Variabel Penelitian

1. Variabel bebas *Good Corporate Governance*

a. Kepemilikan saham institusional

Kepemilikan saham institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi. Variabel ini diukur dengan cara menghitung prosentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi atau perusahaan dari seluruh saham

perusahaan yang beredar.

$$\text{kepemilikan institusi} = \frac{\text{saham yang dimiliki institusi}}{\text{total saham yang beredar}}$$

Tabel 4.B.1 Rekap Kepemilikan Saham Institusional

Nama Bank	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Muamalat	0,888	0,888	0,571	0,571	0,083	0,224	0,950
BRISyariah	1	1	1	1	1	0,008	0,998
BNISyariah	1	1	1	1	1	1	0,999
MegaSyariah	1	1	1	1	1	1	0,999
PaninSyariah	0,918	0,918	0,913	0,997	0,941	0,941	0,919
Mandiri Syariah	0,999	1	0,999	1	0,999	1	1
BCASyariah	1	1	1	1	1	1	1

b. Proporsi Dewan Komisaris independen

Proporsi dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata bertindak demi kepentingan

perusahaan. Variabel ini diukur dengan prosentase komisaris independen terhadap total komisaris perusahaan.

$$komisaris\ independen = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah anggota dewan komisaris}}$$

Tabel 4.B.2 Rekap Proporsi Dewan Komisaris Independen

Nama Bank	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Muamalat	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,4
BRISyariah	0,5	0,8	0,6	0,4	0,75	0,6	0,5
BNISyariah	0,667	0,667	0,667	0,5	0,75	0,4	0,5
MegaSyariah	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	1	1
PaninSyariah	0,667	0,667	0,667	1	0,667	0,667	0,333
MandiriSyariah	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,75	0,5
BCASyariah	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667

c. Jumlah Dewan Direksi

Jumlah dewan direksi merupakan jumlah direksi yang dimiliki sebuah perusahaan yang bertugas untuk menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Variabel ini diukur dengan jumlah dewan direksi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan.

Dewan direksi= Σ anggota dewan direksi

Tabel 4.B.3 Rekap Jumlah Dewan Direksi

Nama Bank	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Muamalat	5	5	7	7	6	8	6
BRISyariah	4	4	5	5	5	5	5
BNISyariah	4	4	4	4	4	5	4
Mega Syariah	4	4	4	4	4	4	4
Panin Syariah	3	3	3	5	3	3	4
Mandiri Syariah	6	5	7	6	7	5	6
BCASyariah	4	4	4	4	4	4	4

2. variabel bebas *Sharia Compliance*

a. *Islamic Income Ratio*

Islamic Income Ratio atau pendapatan Islam adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan serta investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. *Islamic Income Ratio* digunakan untuk menilai prosentase pendapatan Islam dari seluruh total pendapatan yang diterima bank syariah baik pendapatan halal maupun non halal. Variabel ini dihitung dengan rumus:

$$ISIR = \frac{Is\ In}{\text{total pendapatan}}$$

Tabel 4.B.4 Rekap Islamic Income Ratio

Nama Bank	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Muamalat	0,908	0,943	0,958	0,955	0,959	0,941	0,963
BRISyariah	0,926	0,961	0,944	0,947	0,951	0,962	0,927
BNISyariah	0,832	0,935	0,946	0,946	0,961	0,952	0,944
Mega Syariah	0,81	0,866	0,793	0,78	0,786	0,824	0,846
Panin Syariah	0,965	0,938	0,615	0,621	0,732	0,741	0,625
Mandiri Syariah	0,824	0,854	0,873	0,897	0,921	0,934	0,914
BCASyariah	0,924	0,935	0,87	0,754	0,732	0,678	0,623

b. Profit Sharing Ratio

Salah satu unsur penting dalam bank syariah adalah pembiayaan dengan cara bagi hasil. *Profit Sharing Ratio* digunakan untuk melihat bagaimana bank syariah menggunakan aktivitas bagi hasil dalam kegiatannya dengan total pembiayaan. Rasio ini membandingkan jumlah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan keseluruhan pembiayaan yang diberikan. Rasio ini menghitung bagi hasil

dari pembiayaan yang dilakukan bank syariah. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$PSR = \frac{\text{jumlah pembiayaan bagi hasil}}{\text{total pembiayaan}}$$

Tabel 4.B.5 Rekap Profit Sharing Ratio

Nama Bank	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Muamalat	0,444	0,439	0,471	0,48	0,492	0,461	0,472
BRISyariah	0,242	0,258	0,303	0,301	0,323	0,421	0,402
BNISyariah	0,114	0,113	0,132	0,141	0,152	0,151	0,132
Mega Syariah	0,005	0,006	0,011	0,064	0,072	0,085	0,087
Panin Syariah	0,49	0,81	0,895	0,815	0,831	0,839	0,741
Mandiri Syariah	0,191	0,183	0,209	0,232	0,251	0,269	0,24
BCASyariah	0,453	0,404	0,382	0,408	0,542	0,468	0,421

3. Variabel terikat kinerja keuangan

Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA). ROA dihitung dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{total aktiva}}$$

Tabel 4.B.6 Rekap ROA

Nama Bank	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Muamalat	0,27	0,17	0,2	0,22	0,11	0,08	0,02
BRISyariah	1,15	0,08	0,76	0,95	0,51	0,43	0,31
BNISyariah	1,37	1,27	1,43	1,44	1,31	1,42	1,82
Mega Syariah	2,33	0,29	0,3	2,63	1,56	0,93	0,89
Panin Syariah	1,03	1,99	1,14	0,37	-	0,26	0,25
Mandiri Syariah	1,53	0,04	0,56	0,59	0,59	0,88	1,69
BCASyariah	1	0,8	1	1,1	1,17	1,17	1,15

C. Sejarah Singkat Objek Penelitian

1. Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia telah memulai perjalanan bisnis sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia (RI). Mulai awal resmi beroperasi pada 1 Mei 1992. Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah

(Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan Multifinance Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu, produk Bank yaitu Shar-E yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-E Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 telah mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertamakali di Indonesia serta layanan E-Channel seperti Internet Banking, Mobile Banking, ATM, dan Cash Management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pioner produk syariah di Indonesia yang kemudian menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Bank Muamalat Indonesia, Pada 27 Oktober 1994 mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan *public* yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kemudian, pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah (SSM). Aksi

korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Bank semakin melebarkan dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia, Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi Bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Bank Muamalat Indonesia telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS). Setelah menginjak usia yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* pada logo Bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance

(ALIF) yang telah memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitul Maal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Mulai tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah, Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”.⁹⁵

2. Bank BRI Syariah

Awal mula pendirian PT Bank BRI syariah tidak terlepas dari akuisisi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat no. 10/67/Kep.GBI/DPG/2008 pada 16 Oktober 2008 BRI Syariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT Bank BRISyariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah Islam.

⁹⁵ <https://www.bankmuamalatindonesia.co.id/sejarah-bank-muamalat.html>., diakses pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 Pukul 11.46 WIB.

Pada tanggal 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyebar ke dalam PT Bank BRISyariah. Proses *spin off* tersebut berlaku efektif pada 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Direktur utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk) bapak Sofyan Basir dan bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah.

BRI Syariah telah melihat potensi besar pada segmen perbankan syariah. Dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah. Bank berkomitmen untuk produk serta layanan terbaik yang menentramkan, BRI Syariah terus tumbuh secara positif.

BRI Syariah juga fokus membidik berbagai segmen masyarakat. Basis nasabah yang terbentuk secara luas di seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa BRI Syariah memiliki kapabilitas tinggi sebagai bank ritel modern terkemuka dengan layanan *finansial* sesuai kebutuhan nasabah.

BRI Syariah terus mengasah diri dalam menghadirkan yang terbaik bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan. BRI Syariah juga senantiasa memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta Undang-Undang yang berlaku di

Indonesia. Dengan demikian BRI Syariah dapat terus melaju menjadi bank syariah terdepan dengan jangkauan termudah. Pada tahun 2018, BRI Syariah mengambil langkah lebih pasti lagi dengan melaksanakan *Initial Public Offering* pada 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia (BEI). IPO ini menjadikan BRI Syariah sebagai anak usaha BUMN di bidang syariah yang pertama melaksanakan penawaran umum saham perdana.⁹⁶

3. Bank BNI Syariah

Pada tahun 1997, adanya tempaan krisis moneter telah membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan tiga pilar yaitu adil, transparan dan masalah mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998 pada tanggal 29 April 2000 telah didirikan Unit Usaha Syariah BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya Unit Usaha Syariah BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

Disamping itu, nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI konvensional (*Office*

⁹⁶ <https://www.brisyariah.co.id/sejarah-bank-brisyariah.html>, diakses pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 Pukul 11.55 WIB.

Channeling) dengan kurang lebih 1500 *outlet* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaan operasionalnya, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dewan Pengawas Syariah(DPS) yang diketahui saat ini yaitu K.H. Ma'ruf Amin. Semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah. Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEPGBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan didalam *Corporate Plan* Unit Usaha Syariah BNI tahun 2003 telah ditetapkan bahwa status Unit Usaha Syariah bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* pada tahun 2009. Rencana tersebut telah terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* pada bulan Juni 2010 dan tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu diterbitkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin

meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Pada Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah bertambah dan mencapai hingga 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 mobil layanan gerak dan 20 *Payment Point*.⁹⁷

4. Bank Mega Syariah

Diawali dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada tanggal 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No.1046/KMK/013/1990 tersebut, telah diakuisisi *CT Corpora* (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para *Global Investindo*) dan PT Para Rekan Investama pada tahun 2001. Para pemegang saham, Sejak awal memang ingin mengonversi Bank Umum Konvensional itu menjadi Bank Umum Syariah. Keinginan tersebut telah terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi Bank Syariah melalui Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada tanggal 27 Juli 2004, sesuai dengan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia

⁹⁷ <https://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bank-bnisyariah.html>, diakses pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 Pukul 12.00 WIB.

No.6/11/KEP.DpG/2004. Pengkonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengkonversian Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.

BSMI resmi beroperasi pada tanggal 25 Agustus 2004. Hampir tiga tahun pada tanggal 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo Bank Umum Konvensional yang menjadi *sister company*-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/75/KEP.GBI/DpG/2010, PT. Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah. Untuk mewujudkan visi "Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa", *CT Corpora* sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai Bank Umum Syariah terbaik di industri Perbankan Syariah Nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Sejalan dengan perkembangan bisnis pada

tahun 2010 melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp 400 miliar menjadi Rp1,2 triliun kemudian modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar menjadi Rp318,864 miliar. Saat ini, modal disetor telah mencapai Rp787,204 miliar.

Di sisi lain, pemegang saham bersama seluruh jajaran manajemen Bank Mega Syariah senantiasa bekerja keras, memegang teguh prinsip kehati-hatian, serta menjunjung tinggi asas keterbukaan dan profesionalisme dalam melakukan kegiatan usahanya. Beragam produk juga terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta didukung infrastruktur layanan perbankan yang semakin lengkap dan luas, termasuk dukungan sejumlah kantor cabang di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengukuhkan semboyan "Untuk Kita Semua", pada 2008, Bank Mega Syariah mulai memasuki pasar perbankan mikro dan gadai. Strategi tersebut ditempuh karena ingin berperan lebih besar dalam peningkatan perekonomian umat yang mayoritas memang berbisnis di sektor usaha mikro dan kecil.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat

melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi peluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik di Indonesia. Selain itu, pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Depag RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah umat Indonesia.⁹⁸

5. Bank Panin Dubai Syariah

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (Panin Dubai Syariah Bank), bertempat di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91,

⁹⁸ <https://www.megasyariah.co.id/sejarah-bank-megasyariah.html>, diakses pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 Pukul 12.10 WIB.

Jakarta Barat. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai Syariah Bank mendapat izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009.⁹⁹

6. Bank Syariah Mandiri

Mulai tahun 1999, kehadiran BSM sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui krisis ekonomi dan moneter pada Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh kehidupan masyarakat tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami

⁹⁹ <https://www.paninsyariah.co.id/sejarah-bank-panin-dubai-syariah.html>, diakses pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 Pukul 12.15 WIB.

krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Pada saat bersamaan pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim tersebut bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang telah memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan

sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir

untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.¹⁰⁰

7. Bank BCA Syariah

Perkembangan Perbankan Syariah yang tumbuh dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir, telah menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal

¹⁰⁰ <https://www.mandirisyahiah.co.id/sejarah-bank-syahiahmandiri.html>, diakses pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 Pukul 12.20 WIB.

yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance. Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.¹⁰¹

D. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan variabel penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata, standart deviasi, varian, maksimum dan minimum. Adapun deskripsi hasil penelitian ini adalah:

Tabel 4.D.1 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Total Sampel (N)	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kep-Ins	49	0,08	1,00	0,9331	0,18632

¹⁰¹ <https://www.bcasyariah.co.id/sejarah-bank-bcasyariah.html>, diakses pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 Pukul 12.30 WIB.

(GCG)					
Kom-In (GCG)	49	0,30	1,00	0,5959	0,13379
Direksi (GCG)	49	3	8	4,65	1,182
IsInR (SC)	49	0,62	0,97	0,8661	0,10565
PSR (SC)	49	0,01	0,90	0,3433	0,23594
ROA	49	0,02	2,63	0,8924	0,62326

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Tabel diatas, menunjukkan bahwa banyaknya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 49 yang merupakan jumlah sampel selama periode penelitian tahun 2013-2019 pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata variabel *Good Corporate Governance* yang di proksikan dengan kepemilikan saham institusi adalah sebesar 0,9331, nilai minimum sebesar 0,08 dan maksimum sebesar 1,00 dengan standart deviasi sebesar 0,18632.

Nilai rata-rata variabel *Good Corporate Governance* yang di proksikan dengan proporsi dewan komisaris independen adalah sebesar 0,5959, dengan nilai minimum sebesar 0,30, dan nilai maksimum sebesar 1,00 dengan standart deviasi sebesar 0,11379. Variabel *Good Corporate Governance*

yang di proksikan dengan jumlah dewan direksi mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,65 dengan nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 8 dengan standart deviasi sebesar 1,182.

Sedangkan variabel *Sharia Compliance* yang diproksikan dengan dengan *Islamic Income ratio* mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,8661 dengan nilai minimum sebesar 0,62, nilai maksimum sebesar 0,97 dengan standart deviasi sebesar 0,10565. Nilai rata-rata variabel *Sharia Compliance* yang diproksikan dengan dengan *Profit Sharing Ratio* adalah sebesar 0,3433, nilai minimum sebesar 0,01, dan nilai maksimum sebesar 0,90 dengan standart deviasi sebesar 0,23494.

Untuk variabel kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan rasio *Return On Asset (ROA)* diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,8924, nilai minimum sebesar 0,02, nilai maksimum sebesar 2,63 dengan standart deviasi sebesar 0,62326.

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa nilai std deviation variabel kepemilikan saham institusional, proporsi dewan komisaris independen, jumlah dewan direksi, *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio* lebih kecil dari pada

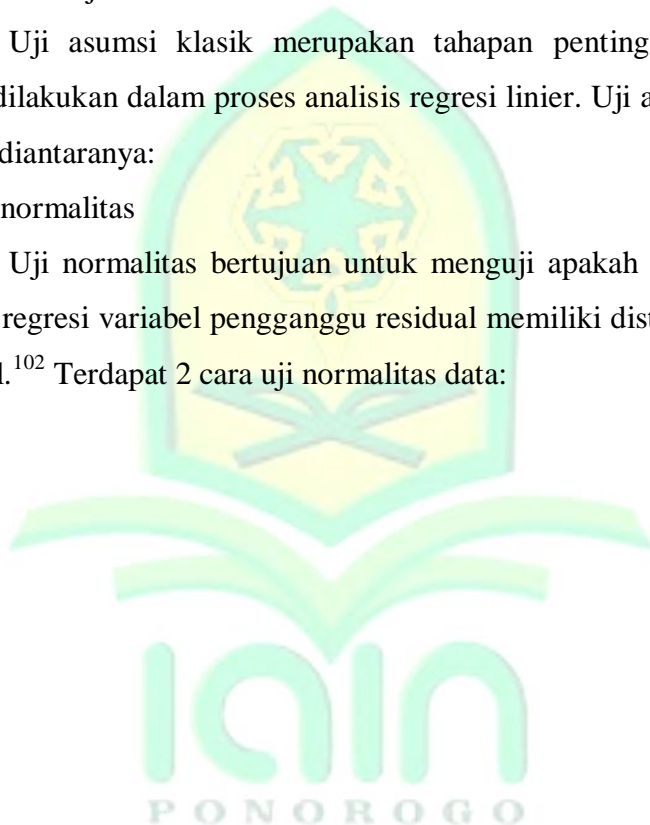
nilai rata-rata (mean) mengindikasikan hasil yang baik, hal ini dikarenakan std deviation mencerminkan penyimpangan dari data variabel tersebut.

2. Analisis Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan tahapan penting yang harus dilakukan dalam proses analisis regresi linier. Uji asumsi klasik diantaranya:

a. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu residual memiliki distribusi normal.¹⁰² Terdapat 2 cara uji normalitas data:

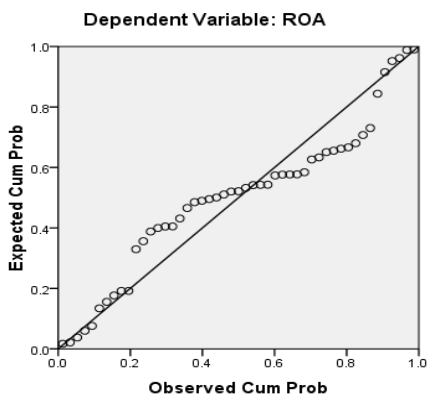


¹⁰² Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), 154.

1) analisis grafik

Grafik D.1 Hasil Uji Normalitas (Analisis Grafik)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data Primer diolah, 2020.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik mengikuti garis dan mendekati garis diagonalnya. Sebagaimana dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal sehingga syarat normalitas telah terpenuhi.

2) analisis statistik

Selain uji normalitas dengan analisis grafik, uji normalitas data dapat juga dilakukan dengan hasil uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk uji normalita data

adalah dengan non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S) pada alpha sebesar 5%. Jika nilai Sig dari pengujian Kolmogorov-Smirnov (K-S) lebih besar dari 0,05 berarti data normal.¹⁰³

Tabel 4.D.2 Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		49
Normal Parameters	Mean	0,0000000
	Std. deviation	0,5094050
Most Extreme Differences	Absolute	0,147
	Positive	0,147
	Negative	-0,137
Kolmogorov-Smirnov Z		1,030
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,239

Sumber: Data Primer diolah, 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Signifikan Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,239 lebih besar dar 0,05 atau

¹⁰³ Ibid., 158-159.

lebih besar dari 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol.

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF, jika nilai *cut off tolerance* lebih kecil dari 0,10 ($< 0,10$) dan VIF lebih besar dari 10 (>10) berarti terdapat multikolinearitas.¹⁰⁴

Tabel 4.D.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kep-In (GCG)	0,615	1,627
Kom-In (GCG)	0,913	1,095

¹⁰⁴ Ibid.,

Direksi (GCG)	0,635	1.574
IsInR (SC)	0,705	1,418
PSR (SC)	0,696	1,437

Sumber: Data Primer diolah, 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* pada kepemilikan saham institusional sebesar 0,615, proporsi dewan komisari independen sebesar 0,913, jumlah dewan direksi sebesar 0,635, *Islamic Income Ratio* sebesar 0,705, dan *Profit Sharing Ratio* sebesar 0,696 dan nilai VIF pada kepemilikan saham institusional sebesar 1,625, proporsi dewan komisaris independen sebesar 1,095, jumlah dewan direksi sebesar 1,574, *Islamic Income Ratio* sebesar 1,418 dan *Profit Sharing Ratio* sebesar 1,437.

Dengan demikian maka, dapat dijelaskan bahwa variabel *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan kepemilikan saham institusional, proporsi dewan komisaris independen, jumlah dewan direksi dan variabel *Sharia Compliance* yang diprosikan dengan *Iskamic Income Ratio*, dan *Profit Sharing Ratio* memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

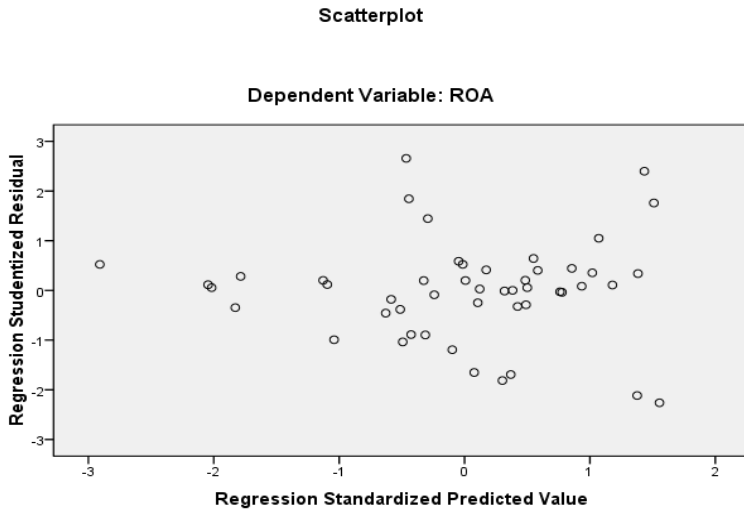
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu dengan residual yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas, model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas.¹⁰⁵ Cara dalam mendeteksi heteroskedastisitas adalah:

1) Uji scatterplot

Salah satu cara untuk menguji heteroskedastisitas adalah dengan uji scatterplot. Ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat pola gambar yang ada pada grafik scatterplot.

¹⁰⁵ Ibid., 108.

Grafik D.2 Hasil Uji Scatterplot



Sumber: Data Primer diolah, 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa titik data menyebar diatas dan di bawah atau disekitar angka nol, titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titi data tidak membentuk pola gelombang melebar kemudian myempit dan melebar kembali, dan penyebaran titik data tidak berpola. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas sehingga model regresi ini dapat terpenuhi.

2) Uji Gletjser

Selain dengan uji scatterplot dalam menguji

heteroskedastisitas dapat juga diuji dengan uji *Gletjser* (*Gletjser Test*), uji *Gletjser* yaitu dengan melakukan analisis regresi variabel independent terhadap nilai absolute residual. Dalam uji *Gletjser* jika tingkat signifikan diatas 5% atau jika t hitung $>$ t tabel, maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun jika tingkat signifikan dibawah 5% atau t hitung $<$ t tabel maka ada gejala heteroskestisitas.¹⁰⁶

Tabel 4.D.4 Hasil Uji Gletjser

Variabel	Signifikan
Kep-In (GCG)	0,871
Kom-In (GCG)	0,192
Direksi (GCG)	0,277
IsInR (SC)	0,438
PSR (SC)	0,242

Sumber: Data Primer diolah, 2020.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel kepemilikan saham institusi adalah sebesar 0,871, proporsi dewan komisar is independen sebesar 0,192, jumlah dewan direksi sebesar 0,277, *Islamic Income Ratio* sebesar 0,438 dan pada *Profit Sharing Ratio*

¹⁰⁶ Ibid.,

sebesar 0,242, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi pada kelima variabel diatas lebih besar dari 0,05 atau 5% maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka terdapat problem autokorelasi.¹⁰⁷ Autokorelasi terjadi apabila penyimpangan pada periode t-1 atau terjadi korelasi diantara kelompok observasi yang diurutkan menurut waktu (pada data *time series*). Untuk menguji autokorelasi digunakan uji Durbin Watson.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi adalah jika $du < d < (4-du)$ maka tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4.D.5 Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	2,025

Sumber: Data Primer diolah, 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai d adalah 2,025 dan nilai du adalah 1,7716 (dari rumus $du=k;n$) dan $4-du=2,2284$, maka nilai d berada diantara du dan $4-du$

¹⁰⁷ Ibid., 154.

(1,7716 > 2,025 > 2,2284) dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

3. Uji hipotesis

a. Uji T parsial

Uji T Parsial berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat.¹⁰⁸ Berikut ini adalah hasil dari uji T parsial:

Tabel 4.D.7 Hasil Uji Hipotesis T

variabel	Sisgnifikan
Kep-Ins (GCG)	0,791
Kom-In (GCG)	0266
Direksi (GCG)	0,009
IsInR (SC)	0,371
PSR (SC)	0,013

Sumber: Data Primer diolah, 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan pada variabel *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan kepemilikan saham institusional sebesar 0,791 lebih besar dari 0,05 artinya kepemilikan saham

¹⁰⁸ Ibid., 164.

institusional tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset*, berarti hipotesis 1 ditolak. Nilai signifikan pada variabel *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen sebesar 0,266 lebih besar dari 0,05 artinya proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset*, berarti hipotesis 2 ditolak. Nilai signifikan pada variabel *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan jumlah dewan direksi sebesar 0,009 kurang dari 0,05 artinya jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap *Return On Asset*, ini berarti hipotesis 3 diterima. Nilai signifikan pada variabel *Sharia Compliance* yang diproksikan dengan *Islamic Income Ratio* sebesar 0,371 lebih besar dari 0,05 artinya *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset*, berarti hipotesis 4 ditolak. Nilai signifikan pada variabel *Sharia Compliance* yang diproksikan dengan *Profit Sharing Ratio* sebesar 0,013 kurang dari 0,05 artinya *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap *Return On Asset*, ini berarti hipotesis 5 diterima.

b. Uji F Simultan

Uji F simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama atau simultan mempengaruhi variabel dependent. Kriteria pengambilan

keputusan pada uji F Simultan yaitu apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara bersama-sama.¹⁰⁹

Tabel 4.D.8 Hasil Uji F Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	6,115	5	1,223	4,197	0,003
Residual	12,531	43	0,291		
Total	18,646	48			

Sumber: Data Primer diolah, 2020.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa F_{hitung} sebesar 4, 197, sedangkan F_{tabel} didapat dari ($k;n-k=5;44$) dimana dalam penelitian ini jumlah variabel bebas (k) berjumlah 5 variabel serta jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 49 sehingga $F_{tabel} = k:n-k = 5;43$ jadi dapat dilihat F_{hitung} pada penelitian ini adalah 2,43. Sehingga dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($4,197 > 2,43$) dengan signifikansi sebesar $0,003 < 0,005$.

Dari hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan saham Institusional, proporsi dewan komisaris independen, jumlah dewan direksi, *Islamic Income*

¹⁰⁹ Ibid.,

Ratio dan *Profit Sharing Ratio* secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap *Return On Asset* artinya semakin tinggi kepemilikan saham oleh institusi, proporsi dewan komisaris independen, jumlah dewan direksi, pendapatan Islam serta pembiayaan bagi hasil secara bersama akan meningkatkan *Return On Asset* pada sektor perbankan.

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.D.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,573	0,328	0,250	0,53983

Sumber: Data Primer diolah, 2020.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R square) adalah sebesar 0,328, artinya bahwa variabel kepemilikan saham institusi, proporsi dewan komisaris independen, jumlah dewan direksi, *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap *Return On Asset* sebesar 32,8%.

BAB V

Pengaruh Kepemilikan saham Institusional Terhadap *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia

H1: tidak terdapat pengaruh signifikan pada variabel kepemilikan saham institusional terhadap *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pada periode 2013-2019. Hal ini ditunjukkan dengan perhitungan T hitung, bahwa T hitung pada variabel kepemilikan institusional sebesar $0,266 < 2,01669$ (T tabel). Jika digambarkan dengan kurva, angka T hitung sebesar 0,266 berada di tengah-tengah antara T tabel positif dan T tabel negatif, artinya naik turunnya saham yang dimiliki institusi pada perbankan sama sekali tidak mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan pada Return On ASSET yang ada pada perbankan.

Kepemilikan saham oleh institusional dapat meningkatkan pengendalian terhadap manajemen dan mengurangi peluang tindak kecurangan yang mungkin

dilakukan.¹¹⁰ Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.¹¹¹ Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan, dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen.¹¹²

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cintia Yuniarti yang berjudul *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan pada perusahaan high profil yang terdaftar di Bursa*

¹¹⁰ E Murwaningsari, "Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance dalam Satu Continuum", *Journal Of Indonesian Economy and Business*, No. 1 Vol. 1, 2009, 1-45.

¹¹¹ M. Jensen, W. Meckling, "Theory of the Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership structure", *Journal of Financial Economic*, Vol. 3, 1976, 305-360.

¹¹² Noor Laila, "Analisis Pengaruh GCG terhadap Nilai Perusahaan", Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.

Efek Indonesia tahun 2010-2013 yang menyatakan bahwa kepemilikan saham institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA).



BAB VI

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris independen Terhadap *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia

H2: variabel proporsi dewan komisaris ndependen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia selama periode 2013-2019. Hal ini ditunjukkan dengan perhitungan T hitung, bahwa T hitung pada variabel kepemilikan institusional sebesar $-1,126 < 2,01669$ (T tabel). Jika digambarkan dengan kurva, angka T hitung sebesar $-1,126$ berada di tengah-tengah antara T tabel positif dan T tabel negatif, artinya meningkat atau tidaknya perbandingan dari komisaris independen dengan total komisaris pada sektor perbankan tidak mempengaruhi adanya peningkatan ataupun penurunan yang terjadi pada *Return On Asset* yang ada pada perbankan syariah. Dewan komisaris independen dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggungjawab untuk memonitor tindakan manajemen. Hasil analisis menunjukkan proporsi dewan

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* karena banyak atau tidaknya komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak menjamin meningkatkan aset dalam memperoleh laba pada perusahaan tersebut. Jumlah dewan komisaris independen baik sedikit ataupun banyak tidak menjamin peningkatan kinerja keuangan pada perbankan syariah tetapi kualitas dari dewan komisaris tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena salah satu karakteristik *Good Corporate Governance* adalah adanya dewan komisaris yang berfungsi mengawasi perusahaan. Setiap anggota dewan komisaris harus mampu berpegang pada kepentingan perusahaan dan selalu melakukan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan para *stakeholder*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cintia Yuniarti yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan pada perusahaan *high profil* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013 yang menyatakan bahwa

dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan.¹¹³



¹¹³ Cintia Yuniarti, “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan pada perusahaan *high profil* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013”, Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, 2014, 121.

BAB VII

Pengaruh Jumlah Dewan Direksi Terhadap *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia

H3: variabel ukuran dewan direksi pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pada periode 2013-2019 berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset*. Hal ini ditunjukkan dengan perhitungan T hitung, bahwa T hitung pada variabel kepemilikan institusional sebesar $-2,733 < 2,01669$ (T tabel). Jika digambarkan dengan kurva, angka T hitung sebesar $-2,733$ lebih besar dari T tabel negatif dan berada di sebelah kiri angka T tabel negatif. Artinya bahwa apabila terjadi peningkatan pada ukuran dewan direksi maka belum tentu akan mengakibatkan penurunan pada *Return On Asset*.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyatakan bahwa direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegiat dalam mengelola perusahaan. masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan

pembagian tugas dan wewenangnya. Kedudukan masing-masing anggota direksi adalah setara.¹¹⁴

Dewan direksi merupakan pusat pengendalian didalam perusahaan dan penanggungjawab utama dalam tingkat kesehatan dan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Dewan direksi merupakan faktor penentu terbentuknya kebijakan yang akan diambil. Semakin banyak jumlah dewan direksi dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin baik, dengan terkontrolnya kinerja perusahaan maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik. Ukuran dan komposisi dewan direksi akan mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas monitoring.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Wijayanti yang berjudul pengaruh penerapan *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011 yang menyatakan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan.¹¹⁵

¹¹⁴ KNKG:2006

¹¹⁵ Sri Wijayanti, "Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa

BAB VIII

Pengaruh *Islamic Income Ratio* Terhadap *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia

H4: variabel *Islamic Income Rasio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia selama periode 2013-2019. Hal ini ditunjukkan dengan perhitungan T hitung, bahwa T hitung pada variabel kepemilikan institusional sebesar $-0,904 < 2,01669$ (T tabel). Jika digambarkan dengan kurva, angka T hitung sebesar $-0,904$ berada di tengah-tengah antara T tabel positif dan T tabel negatif, artinya meningkat atau tidaknya pendapatan Islam pada sektor perbankan tidak mempengaruhi adanya peningkatan ataupun penurunan yang terjadi pada Return On ASSET yang ada pada perbankan.

Perubahan nilai *Islamic Income Ratio* tidak mempengaruhi kinerja keuangan pada perbankan syariah, hal ini disebabkan karena adanya faktor lain yang mempengaruhi

Efek Indonesia tahun 2009-2011, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2012, 56-58.

kinerja keuangan. Disisi lain sumber utama aktivitas tanggungjawab sosial perbankan syariah (pendapatan Islam) berasal dari dana kebajikan dan dana sosial yang juga dihimpun oleh perbankan syariah. Jadi pendapatan operasional bank tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan pada perbankan syariah. Pada praktiknya, pendapatan non Islam (non halal) menjadi bagian dari dana yang tidak bisa dihindarkan.

Perbankan syariah yang memperoleh pendapatan non halal dari kegiatan konvensional membuktikan bahwa perbankan tersebut belum melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian adanya dana non halal disalurkan sebagai dana kebajikan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang ditulis oleh Anita Nur Khasanah yang berjudul pengaruh *intellectual capital* dan *islamicity performance index* terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia yang menyatakan bahwa *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah.¹¹⁶

¹¹⁶ Anita Nur Khasanah, “Pengaruh *Intellectual Capital* Dan *Islamicity Performance Index* terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Nomnal*, No. 1 Vol. V, 2016, 1-18.

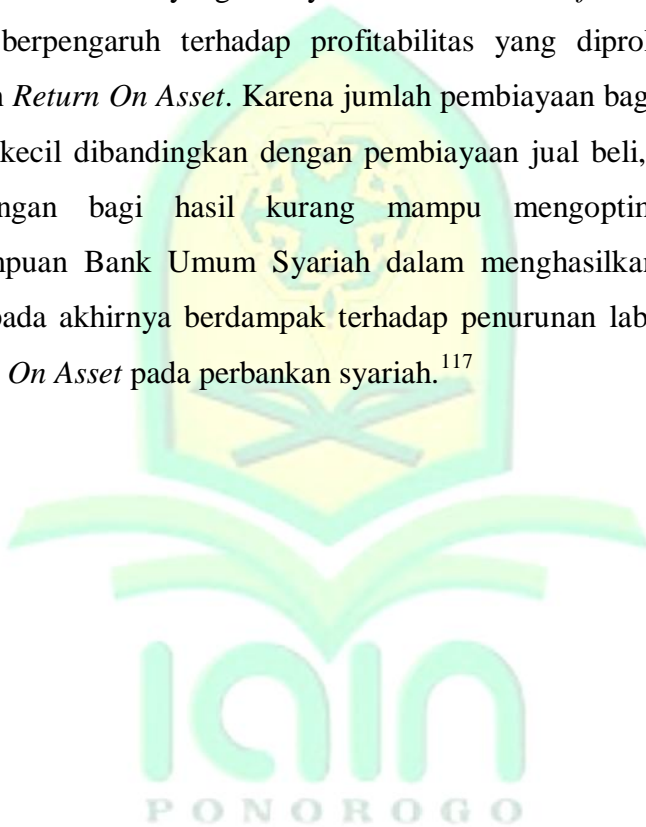
BAB IX

Pengaruh *Profit Sharing Ratio* Terhadap *Return On Asset* pada Perbankan Syariah di Indonesia

H5: variabel *Profit Sharing Ratio* pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pada periode 2013-2019 berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset*. Hal ini ditunjukkan dengan perhitungan T hitung, bahwa T hitung pada variabel kepemilikan institusional sebesar $-2,577 < 2,01669$ (T tabel). Jika digambarkan dengan kurva, angka T hitung sebesar $-2,733$ lebih besar dari T tabel negatif dan berada di sebelah kiri angka T tabel negatif, artinya bahwa apabila terjadi peningkatan pada *Profit Sharing Ratio* maka belum tentu akan mengakibatkan penurunan pada *Return On Asset*.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya *Profit Sharing Ratio* akan menyebabkan meningkatnya kinerja keuangan pada perbankan, hal ini disebabkan karena adanya indikasi pembiayaan yang tidak lancar akan mempengaruhi perolehan laba pada perbankan syariah.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Siti Maisaroh berjudul pengaruh *intellectual capital* dan *islamicity performance index* terhadap *profitability* perbankan syariah Indonesia yang menyatakan bahwa *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan *Return On Asset*. Karena jumlah pembiayaan bagi hasil relatif kecil dibandingkan dengan pembiayaan jual beli, maka sumbangan bagi hasil kurang mampu mengoptimalkan kemampuan Bank Umum Syariah dalam menghasilkan laba yang pada akhirnya berdampak terhadap penurunan laba atau *Return On Asset* pada perbankan syariah.¹¹⁷



¹¹⁷ Siti Maisaroh, “Pengaruh *Intellectual Capital* dan *Islamicity Performance Index* Terhadap *Profitability* Perbankan Syariah Indonesia”, *Jurnal Fakultas Ekonomi UIN Malang*, 2015, 1-10.

BAB X

Kepemilikan Saham Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Jumlah Dewan Direksi, *Islamic Income Ratio*, dan *Profit Sharing Ratio* Secara Simultan Terhadap *Return On Asset* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

A. Pengaruh Kepemilikan Saham Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Jumlah Dewan Direksi, *Islamic Income Ratio*, dan *Profit Sharing Ratio* Secara Simultan Terhadap *Return On Asset* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis uji regresi linier berganda pada uji F dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 diketahui bahwa variabel Kepemilikan Saham Institusional (X1), Proporsi Dewan Komisaris independen (X2), Jumlah Dewan Direksi (X3), *Islamic Income Ratio* (X4), dan *Profit Sharing Ratio* (X5) secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Return On Asset* (Y). Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil uji F

Simultan dengan nilai signifikan sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,005 (5%).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dilakukan oleh Filia Puspitasari dan Endang Ernawati berjudul pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada badan usaha yang menyatakan bahwa penerapan *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada badan usaha.¹¹⁸ Dan penelitian yang dilakukan oleh Fajar Budiman berjudul pengaruh *sharia compliance* dan *islamic corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia periode 2012-2016 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara *sharia compliance* dan *islamic corporate governance* dengan kinerja keuangan.¹¹⁹ Dapat disimpulkan bahwa *Return On Asset* dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham institusional, proporsi dewan komisaris independen, jumlah dewan direksi, *islamic income ratio*, dan *profit sharing ratio*.

¹¹⁸ Filia Puspitasari dan Endang Ernawati, "Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Usaha", *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, No. 2 Vol. 3, Agustus, 2010, 189-125.

¹¹⁹ Fajar Budiman, "pengaruh *sharia compliance* dan *islamic corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia periode 2012-2016", 2017.

B. Hasil analisis variabel dominan Kepemilikan Saham Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Jumlah Dewan Direksi, *Islamic Income Ratio*, dan *Profit Sharing Ratio* Terhadap *Return On Asset*.

Berdasarkan hasil uji T didapatkan hasil antara kepemilikan saham institusional dengan *Return On Asset* menunjukkan signifikansi sebesar 0,791, hasil Uji T antara proporsi dewan komisaris independen dengan *Return On Asset* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,266, hasil Uji T antara jumlah dewan direksi dengan *Return On Asset* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,009, hasil Uji T antara *Islamic Income Ratio* dengan *Return On Asset* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,371, sedangkan hasil Uji T antara *Profit Sharing Ratio* dengan *Return On Asset* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,013. Dapat disimpulkan bahwa diantara kepemilikan saham institusional, proporsi dewan komisaris independen, jumlah dewan direksi, *islamic income ratio*, dan *profit sharing ratio* yang berpengaruh paling dominan terhadap *Return On Asset* adalah jumlah dewan direksi karena memiliki nilai signifikansi paling kecil.

BAB XI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data yang telah dijabarkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Variabel *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset*. Pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham institusional kurang kuat dalam mempengaruhi *Return On Asset*.
2. Variabel *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset*. Pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris kurang kuat dalam mempengaruhi *Return On Asset*.
3. Variabel *Sharia Compliance* yang diproksikan dengan jumlah dewan direksi berpengaruh negatif tidak signifikan

terhadap *Return On Asset*. Pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Artinya bahwa apabila terjadi peningkatan pada ukuran dewan direksi maka belum tentu akan mengakibatkan penurunan pada *Return On Asset*.

4. Variabel *Sharia Compliance* yang diproksikan dengan *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset*. Pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa *Islamic Income Ratio* kurang kuat dalam mempengaruhi *Return On Asset*.
5. Variabel *Sharia Compliance* yang diproksikan dengan *Profit Sharing Ratio* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Return On Asset*. Pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Artinya bahwa apabila terjadi peningkatan pada *Profit Sharing Ratio* maka belum tentu akan mengakibatkan penurunan pada *Return On Asset*.
6. Kepemilikan saham institusional, proporsi dewan komisaris independen, jumlah dewan direksi, *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio* secara simultan berpengaruh terhadap *Return On Asset* sebesar 32,8%, artinya semakin tinggi kepemilikan saham oleh institusi, proporsi dewan komisaris independen, *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio* akan meningkatkan *Return On Asset* pada

sektor perbankan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang dijelaskan diatas maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dilakukan modifikasi variabel penelitian atau dikombinasikan dengan variabel dari rujukan lain yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* agar mendapatkan hasil analisis yang maksimal.
2. Hasil koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,328, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat hanya 32,8%. Jadi pengaruh kelima variabel masih sangat kecil. Oleh karena itu, sebaiknya bagi peneliti yang akan meneliti tema yang sama menambah jumlah variabel bebas agar hasil penelitian dalam membuktikan variabel menjadi lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah:

- Ardhanareswari, Resti. “Pelaksanaan dan Pengungkapan Good Corporate Governance pada Bak Umum Syariah” *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2 No. 1, April 2017.
- Aryani, Dwi dan Febrina Rosmita. “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap kepuasan pelanggan dalam membentuk loyalitas pelanggan”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Fakultas Firsip Universitas Indonesia, Vol. 17, No. 2, Mei, 2010.
- Budiman, Fajar. “Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016”, 2017.
- Fauzi, Achmad Noor. “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015)”, *Tesis*, Surakarta: Manajemen Keuangan Perbankan Syariah, 2016.
- Jensen, M dan W. Meckling. “Theory of the Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership

structure”, *Journal of Financial Economic*, Vol. 3, 1976.

Khasanah, Anita Nur. “Pengaruh *Intellectual Capital* Dan *Islamicity Performance Index* terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Nomnal*, No. 1 Vol. V, 2016.

Laila, Noor. “Analisis Pengaruh GCG terhadap Nilai Perusahaan”, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.

Maisaroh, Siti. “Pengaruh *Intellectual Capital* dan *Islamicity Performance Index* Terhadap *Profitability* Perbankan Syariah Indonesia”, *Jurnal Fakultas Ekonomi UIN Malang*, 2015.

Maulidani, Rizki. “Penerapan *Good Corporate Governance* pada Perseroan Tertutup (Studi Kasus PT. Mega Politan Development)”, *Tesis*, Depok: Kenotariatan, 2012.

Mulazid, Ade Soryan. “Pelaksanaan *Sharia Compliance* pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Jakarta)”, *Jurnal Madania*, Vol. 20, No. 1, Juni 2016.

Murwaningsari, E. “Hubungan *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibilities* dan *Corporate Financial Performance* dalam Satu Continuum”, *Journal Of Indonesian Economy and Business*, No. 1 Vol. 1, 2009.

- Nasution, Ananda Anugrah. “Pengaruh *Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Sosial Reporting* Terhadap Kinerja Keuangan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Moderating pada Bank Syariah”, *Tesis*, Sumatera Utara: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2018.
- Novitasari, Amartantina. “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan dengan RGEK (*Rick Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital*) pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017”, *Tesis*, Ponorogo: Ekonomi Syariah, 2019.
- Puspitasari, Filia dan Endang Ernawati. “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Usaha”, *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, No. 2 Vol. 3, Agustus, 2010.
- Sabatini. “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesiai*, Vol. 6 No. 3, Desember, 2010.
- Sarafina, Salsabila dan Muhammad Saifi. “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan (Studi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015), Malang: Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi, *Jurnal*

Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 50 No. 3 September 2017.

Suminto, Ahmad. “Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) dan Corporate Image Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Pada Nasabah PT BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo,” *Tesis*, Ponorogo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Ponorogo, 2019.

Wijayanti, Sri. “Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2012.

Yuniarti, Cintia “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan pada perusahaan *high profil* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013”, Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, 2014.

Buku:

Abdullah, Mal an. *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2010.

Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Binhadi dkk. *Pedoman Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance: 2004.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2010.
- Daniri, M. Ahmad. *Good Corporate Governance; Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: PT. Ray Indonesia 2005.
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Effendi, Muh. Arief. *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2016.
- Ghufron, M. N dan Risnawita R. *Teori-teori Psikologi*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2010.
- Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Kaen, Fred R. *A Blueprint for corporate Governance; Stregy, Accountability, and the Preservation of Shareholder Value*, USA: AMACOM, 2003.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Maksum, Azhar. *Tinjauan atas Good Corporate Governance di Indonesia*, Medan: USU, 2005.
- Milaharta, Misahardi. *Hak Perdagangan Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporat Governance*, Jakarta: PPSUI, 2002.
- Muhammad. *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- _____. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Mulyadi. *Akuntansi Manajemen; Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, Yogyakarta:STIE YKPN, 2001.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Prasetyantoko, A. *Corporate Governance: Pendekatan Institusional*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.

- _____. *Manajemen Sumber daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Rodoni, Ahmad dan Herni Ali. *Manajemen Keuangan Modern*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Sedarmayanti. *Good Governance dan Good Corporate Governance*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Siswanto, Sutoyo dan E. John Aldridge. *Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*, Jakarta:PT. Damar Mulia Pustaka, 2005.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
- Sudaryono. *Pengantar Manajemen Teori dan Kasus*, Yogyakarta: CAPS, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- _____. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- _____. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Surya, Indra dan Ivan Yustivandana. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak*

Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Jakarta: Kencana, 2008.

Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Syahroza, Akhmad. *Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan Teori Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2005.

Syamsuddin, Lukman. *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Tunggal, Imam Sjahputra. *Membangun Good Corporate Governance*, Jakarta: Harvarindo, 2002.

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Tesis dan Skripsi*, Jakarta: Rajawali 2013.

Wirnyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

Yaya, Rizal. dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Undang-undang:

Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI), 2000.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), 2004.

Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia, Jakarta: Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, 2004.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam Hamdani, *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.

Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Internet/Website:

<https://www.bankmuamalatindonesia.co.id/sejarah-bank-muamalat.html>. Diakses 29 Mei 2020.

<https://www.bcasyariah.co.id/sejarah-bank-bcasyariah.html>. Diakses 29 Mei 2020.

<https://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bank-bnisyariah.html>. Diakses 29 Mei 2020.

<https://www.brisyariah.co.id/sejarah-bank-brisyariah.html>.
Diakses 29 Mei 2020.

<https://www.mandirisyariah.co.id/sejarah-bank-syariahmandiri.html>. Diakses 29 Mei 2020.

<https://www.megasyariah.co.id/sejarah-bank-megasyariah.html>. Diakses 29 Mei 2020.

<https://www.paninsyariah.co.id/sejarah-bank-panin-dubai-syariah.html>. Diakses 29 Mei 2020.

<https://www.ojk.go.id/bank-syariah>. Diakses 5 Februari 2020.

<https://www.ojk.go.id/konsep-dasar-dan-prinsip-prinsip-dasar>. Diakses 13 Februari 2020.

Shalul, Hameed. “Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks dalam https://iium.edu.my/iaw/studentsPapers_files/alternative_accounting_performance_measures_forislamic_banks.html, diakses 26 Juni 2020.